

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT
ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ANALISIS
TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN
PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM
KELUARGA”**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RISA HAYATI
NIM: 21890220036

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H / 2019 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	Risa Hayati
Nomor Induk Mahasiswa	21890220036
Gelar Akademik	M.H. (Magister Hukum)
Judul	Kedudukan dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik menurut Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Pergeseran kewenangan Paman sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga

Tim Penguji

Dr. Andi Murniati, M.Pd
Ketua

Dr. Masrun, MA
Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
Penguji I

Dr. Zulkayandri, M. Ag
Penguji II

Tanggal Ujian/Pengesahan 19 November 2019

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "**KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENERUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA.**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : RISA HAYATI
NIM : 21890220036
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 19 November 2019.

Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001



.....
Tgl: 27 November 2019

Penguji II

Dr. Zulkavandri, M.Ag
NIP. 197101051995031002


.....
Tgl: 27 November 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENERUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA.”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **RISA HAYATI**
NIM : 21890220036
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah di ujikan pada tanggal 19 November 2019.

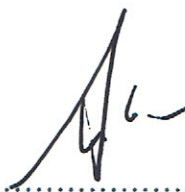
Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001



.....
Tgl: 27 November 2019

Pembimbing II

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP. 1977002272003121002


.....
Tgl: 27 November 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari
Risa Hayati

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Risa Hayati
Nim : 21890220036
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT
ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "ANALISIS
TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN
SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019
Pembimbing I,



Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 196708221998031001

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari
Risa Hayata

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Risa Hayati
Nim : 21890220036
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT
ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ANALISIS
TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN
PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM
KELUARGA”.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019
Pembimbing II


Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP. 197700227 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Hayati
NIM : 21890220036
Tempat/ Tgl. Lahir : Pauh, 13 Desember 1993
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul **"KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA"** . sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan Tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi untuk memperbaiki karya ilmiah ini sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari plagiat. Untuk menghindarkan pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019
Hormat saya,



RISA HAYATI
NIM. 21890220036



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA” Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magester Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT , bantuan moril dan non moril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Secara khusus ucapan terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a Ayahanda Warmanizar, ibunda Asmawati, uni Nova Rita, uda Idris, uni Widia dan adinda Alfi Syahril, dan kepada nenek Syarkiah.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf pascasarjana UIN SUSKA RIAU yang memberikan sarana belajar, terutama kepada Prof. Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Akhmad Mujahidin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.

6. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.

Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.

Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2018
Semoga sehat selalu dan sukses.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 02 November 2019

RISA HAYATI

NIM. 21890220036



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN KATA.....	vii
PEDOMANAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Mamak Menurut Adat	20
1. Pengertian Mamak	20
2. Kewenangan Mamak	39
3. Macam-macam Mamak	41
4. Konsep Pergeseran	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Mamak Sebagai Hakam	48
1. Pengertian Hakam	48
2. Sejarah Hakam dalam Perkawinan.....	54
3. Tugas dan Fungsi Hakam.....	61
C. Penelitian Terdahulu	65
D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	77
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	78
C. Populasi dan Sampel	78
D. Data dan Sumber Data	79
E. Teknik Pengumpulan Data.....	82
F. Metode Pengolahan Data	84
G. Teknik Analisa Data.....	85
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	88
A. Peranan Mamak Sebagai Hakam	88
1. Kedudukan Mamak Sebagai Hakam Masa Dahulu di Nagari Kamang Mudik	88
2. Kedudukan Mamak Sebagai Hakam Dewasa ini di Nagari Kamang Mudik	98
B. Pergeseran Kedudukan Mamak	116
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Urgensi Mamak Saat Ini Sebagai Hakam.....	120
BAB V PENUTUP.....	130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1	HR	Hadis Riwayat
2	SWT	Subhana Wata'ala
3	SAW	Sallallohu 'Alaihi Wasallam
4	UU	Undang-Undang
5	KHI	Kompilasi Hukum Islam
6	Q.S	Qur'an.Surat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	a	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	,
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	,
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻱ	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قبل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA ”**.

Mamak mempunyai kedudukan yang vital dalam struktur kekerabatan Minangkabau khususnya dalam hubungan mamak dan kemenakan. Adat Minangkabau memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak daripada kepada ibu. Mamak di Minangkabau tidak hanya memelihara dan memimpin anak dari keluarga intinya, tetapi juga memelihara dan memimpin kemenakannya. Penentuan sikap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak selalu di bawa penyelesaiannya kepada mamak. Apabila terjadi konflik atau perselisihan pada keluarga. Mamak harus menyelesaikan sebagaimana dipertuahkan oleh adat *Kusuik nan kamanyalasai, karuah nankamampajaniah*. Unsur pemimpin di Minangkabau dikenal dengan “*Tungku Tigo Sajarangan*” (niniak Mamak, alim ulama, dan cadiak pandai). Sebagai wadah kepemimpinan di Minangkabau, harus kompak dalam kesatuan gerak pembinaan masyarakat dengan berpegang teguh pada “Tali Tigo Sapilin” (Agama, Adat dan Perundang Undangan).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel yang diambil dengan purposive sampling. Analisa dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan mamak dalam masyarakat adat Nagari Kamang Mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga.

Adapun hasil dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik, untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah permasalahan pernikahan, perceraian, rujuk, talak yang berhubungan dengan syarak penyelesaiannya dilakukan oleh wali (ayah). Jika ayah tidak bisa menyelesaikan baru mamak yang bertindak sebagai juru damai diluar perkara yang berhubungan dengan syarak. Upaya penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai dan ke keluargaan. Penyelesaian konflik harta pencaharian suami istri di selesaikan oleh pengadilan. Penyelesaian permasalahan di Nagari Kamang Mudik dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah sampai keatas. Permasalahan keluarga yang berhubungan dengan kelompok orang diselesaikan oleh mamak sebagai pimpinan dalam rumah gadang atau kaum. Pergeseran peran mamak disebabkan karena faktor: Pendidikan, ekonomi, mudarnya tali silaturahmi, dan menguatnya peran keluarga inti. Kedudukan mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik untuk kemaslahatan kemenakan yang telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi aturan adat. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka diperbolehkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذه الأطروحة بعنوان "موقف العم في مجتمع Nagari Kamang Mudik وفقا للمنظور القانوني الإسلامي" تحليل عن تحويل سلطة العم كالحكم في قانون الأسرة ".

العم لديه موقف ضروري في هيكل القرابة في Minangkabau ، وخاصة في العلاقة بين العم وأبناء إخوته. العرف في Minangkabau أن العم يُعطى له مقاما أعلى من الأم والوظيفة. فوظيفة العم لا تقف في رعاية أبنائه وحفظهم فحسب بل لزم عليه أن يقوم برعاية أبناء إخوته وحفظهم. وتحديد القرارات المتعلقة بمصالح الكثير من الناس لا يخلو حلّه من دور العم. إذا حدث التعارض أو النزاع في الأسرة لابد للعم أن يقوم بحلّه كما أشار إليه المثل التقليدي *Kusuik Nan Kamanyalasai, Karuah Nan Kamampajanih*. وعناصر الزعيم في Minangkabau معروفة بمصطلح *Tungku Tigo Sajarangan* (العم والعالم والذكي). فالزعامة في Minangkabau توحد فيها حركات لبناء المجتمع بالحنيفية في *Tali Tigo Sapilin* (الدين والعادة والقانون). استخدم هذا البحث طريقة إمبيريس القانوني. وعينة البحث حصلت عليها الباحثة من خلال المعاينة الهادفة. وقامت الباحثة بتحليل البيانات تحليلًا وصفيًا، أي وصف موقف العم في مجتمع Nagari Kamang Mudik وفقا للمنظور القانوني الإسلامي "تحليل عن تحويل سلطة العم كالحكم في قانون الأسرة وعرضه. وتتمثل نتائج هذا البحث في معرفة موقف العم كالحكم في Nagari Kamang Mudik، ولمعرفة العوامل التي تسبب تحول موقف العم كالحكم في Nagari Kamang Mudik ، ولمعرفة موقف العم كالحكم في Nagari Kamang Mudik وفقا للقانون الإسلامي. ونتيجة هذا البحث هي أن أمور الزواج والطلاق والرجوع قام بحلّها أب. فإن لم يستطع فُوسد الأمر إلى العم ليحل تلك المشاكل التي تتعلم بالشريعة. والمحاولة لحلّ المشاكل قيمت بالسلام وبالعشائري. وتسوية النزاعات بين الزوج والزوجة في المال قام بها المحكمة. وتسوية المشاكل في Nagari Kamang Mudik قيمت قياما متدرجا أي تبدأ من المستوى الأسفل إلى الأعلى. ومشاكل الأسرة التي تتعلق بفرقة صغيرة من الناس قام بتسويتها العم كزعيم في المجتمع. وأما تحويل سلطة العم كالحكم ترتب عليه عناصر آتية: التربية والاقتصاد وخفض صلة الرحم واشتداد موقف الأهل الأساسي. فموقف العم كالحكم لمصلحة أبناء إخوته في مجتمع Nagari Kamang Mudik لقد كان ماثورا وأصبح عادة للمجتمع. فما دامت العادة لا تخالف القانون الإسلامي فكونها جائز.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled THE POSITION OF UNCLE IN THE PEOPLE'S NAGARI COMMUNITY ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE "ANALYSIS OF SHIFTING THE AUTHORITY OF PAMAN AS A LAW IN THE FAMILY'S LAW".

uncle has a vital position in the kinship structure of Minangkabau, especially in the relationship of uncle and nephew. The Minangkabau custom gives a higher position and obligation to uncle than to mother. the uncle in Minangkabau not only looked after and led the children of his core family, but also looked after and led his nephew. Determination of the attitude of decisions relating to the interests of many people always brought the solution to the uncle. If there is a conflict or dispute with the family. uncle must finish as commanded by the custom Kusut that kamanyalasai, karuah nan kamampajaniah. The leader element in Minangakabau is known as the "Tigo Sajaringan Furnace" (uncle, ulam, and cleverly clever) as a forum for Minangkabau leadership, must be compact in the unity of the community development movement by adhering to the "Tigo Sapilin Rope" (Religion, Custom and Invitation Law).

This research uses juridical emperis research method. Samples taken by purposive sampling. The analysis was carried out in a descriptive analysis, which provides an overview and reveals how the actual position of the uncle in the Nagari Kamang Mudik indigenous community according to the perspective of Islamic law analyzes the shifting of uncle's authority as hakam in family law.

The results of this study are to find out how the position of mamak as hakam in Nagari Kamang Mudik, to find out what factors cause the shifting of uncles as hakam in Nagari Kamang Mudik, and to find out how a review of Islamic law regarding the position of uncles as hakam in Nagari Kamang Mudik .

The conclusion of this study is the problem of marriage, divorce, reconciliation, divorce related to sharia. The settlement is carried out by the guardian (father), if the father cannot resolve the new uncle who acts as a peacemaker outside the cases related to sharia. efforts to resolve disputes are carried out peacefully and in a friendly manner. Settlement of husband and wife livelihood conflicts is resolved by the court. Problem solving in Nagari Kamang Mudik is done in stages starting from the lower level upwards. Family problems related to groups of people are solved by the uncle as the leader in the gadang or clan house. The shift in uncle's role was due to factors: Education, economy, waning silaturrahmi rope, and strengthening the role of the nuclear family. Mamak's position as uncle in Nagari Kamang Mudik is for the benefit of the nephew which has been carried down for generations and has become a customary rule. As long as the custom is not contrary to Islamic law, it is permissible.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mamak mempunyai kedudukan yang vital dalam struktur kekerabatan Minangkabau khususnya dalam hubungan mamak dan kemenakan.¹ Mamak “paman” adalah saudara laki-laki dari ibu.² Mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu karena beliau saudara kandung. Adat Minangkabau memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak daripada kepada ibu.³

Minangkabau adalah suatu suku yang hidup di Sumatera Barat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan berbentuk *matrilineal*. Sistem kekerabatan *matrilineal* adalah suatu sistem garis keturunan yang menimbulkan kesatuan kekerabatan dimana setiap orang menghubungkan dirinya dengan ibunya, atau suatu bentuk sistem kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan ibu.⁴ Keberadaan ibu bagaikan *limpapeh rumah nan gadang* (tiang utama pada rumah yang besar) yang melambangkan keturunan seseorang.⁵

Sistem kekerabatan *matrilineal* ini dimulai dari lingkungan hidup yang kecil yaitu keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling besar yaitu nagari,

¹ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, 2006), hlm. 181.

² Elizabeth E. Graves; penerjemah: Novi Andri, Leni Marlina, Nurasni, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*, Cet ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2017), hlm. 14.

³ Amir M.S, *Op. Cit*, hlm. 182.

⁴ AA Navis, *Alam Takambang jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti, 1984), hlm. 99.

⁵ M. Rasjid manggis Dt. Panghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 106

sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan bahwa dalam *nagari*, masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.⁶

Adat inilah yang kemudian disebut dengan hukum adat. Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat bersifat dinamis, sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Minangkabau mempunyai ciri khas yang unik dibandingkan dengan hukum adat lainnya di Indonesia. Ia unik karena dilingkungan adat ini berlaku sistem kekerabatan yang berpengaruh terhadap sistem perkawinan, kehartaabendaan, kepemilikan, kewarisan, pergaulan dan lain-lain. Sistem kekerabatan ini menentukan sistem kemasyarakatan yang ada di Minangkabau.⁷

Sudah menjadi pemahaman di tengah masyarakat Minangkabau, bahwa Nagarnya diatur dalam ketentuan adat yang sudah ada sejak turun temurun. Minangkabau merupakan salah satu yang sampai saat ini memepertahankan adanya. Adat adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kepribadian orang Minang, “Adat Isitiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat yang sabana adat” begitu pula dengan agama Islam. Postulat adat yang berlaku dalam mengatur masyarakat Minangkabau adalah, “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*”. Artinya adat yang dipakai di

⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), hlm. 1.

⁷ Hazairin, *Hendak Ke mana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 14

Minangkabau adalah dari ajaran Islam. Adat dengan syarak tidak bisa dipisahkan karena adat Minangkabau adalah produk budaya berdasarkan Agama Islam (Agama Samawi). Unsur pemimpin di Minangkabau dikenal dengan “*Tungku Tigo Sajarangan*” (niniak Mamak, alim ulam, dan cadiak pandai) sebagai wadah kepemimpinan Minangkabau, harus kompak dalam kesatuan gerak pembinaan masyarakat dengan berpegang teguh pada “Tali Tigo Sapilin” (Agama, Adat dan Perundang Undangan).⁸

Adalah hal yang terpantang bagi anggota masyarakat bila ia dikatakan tidak beragama, meskipun kadangkala ada perilakunya tidak sesuai dengan adat dan syarak (Islam) itu sendiri.⁹ Setiap aturan adat tidaklah sama setiap nagari, dalam istilah adat dikatakan “*Lain Lubuak lain ikan, lain padang lain Bilalang*”, namun setiap penentu kebijakan adat berada pada satu titik yaitu ninik mamak, penghulu atau datuk, *nan gadang basa batuah nan mamegang ukua jo jangko, nan mamaciak barih jo balabeh, nan mamakai adat jo limbago, kapai tampek batnyo, kapulang tampek babarito*. Mengajarkan *alua jo patuik mananamkan alua jo patuik, mananamkan raso jo pareso, mahukum adia bakato bana*. Akan menumbuhkan kultur budaya yang bermutu baik, berbudi luhur dan akhlak mulia, sesuai dengan fatwa adat yang mengatakan “*Adat dipakai baru, kain di pakai usang*”, ini adalah unsur kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap ninik mamak dalam adat Minangkabau dan jiwa hakim atau hakam yang harus melekat dalam jiwa setiap

⁸ Bustamam. Dt. Manidiah, *Pembinaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, Baso: LKAM Kabupaten Agam, hlm. 6.

⁹ Wawancara dengan P Dt. Rajo Imbang di Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 08 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nindak mamak dalam menjalankan fungsinya, sebagai identitas masyarakat Minang nan indak lapuak dek hujan indak langgang dek paneh yang terkenal berbudi dan religius.¹⁰

Sedangkan dalam lembaga kepemimpinan kaum, mamak dibagi menjadi tiga bagian dan mempunyai kewenangan masing-masing yaitu:

1. *Tungganai* (mamak rumah) adalah saudara laki-laki sekandung dengan ibu. Mamak Tungganai biasanya tidak bergelar datuk namun dia dipercaya oleh kemenakannya, karena memiliki kecerdasan pandai dari yang lainnya tidak mementingkan diri sendiri, yang secara tulus memberikan perhatian, pembinaan dan memimpin kemenakannya. Bisa dikatakan segala urusan internal rumah gadang orang pertama menghadapinya adalah mamak tungganai. Adapun peran mamak tungganai secara normatif adalah
 - a. Mengelola dan menjaga harta pusaka
 - b. Membantu perekonomian anggota rumah gadang.¹¹
 - c. Mendidik kemenakan.¹²
 - d. Mencarikan jodoh kemenakan.¹³

¹⁰ Wawancara dengan Donri Dt. Sati di Kampuang Barangai Nagari Kamang Mudik, tanggal 9 Juli 2019.

¹¹ Maksudnya adalah seorang mamak tidak harus mati-matian mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kemenakannya, tetapi seorang mamak harus bisa mengajarkan kemenakannya untuk mandiri dan bekerja keras untuk memanfaatkan harta pusaka agar hasilnya dapat memenuhi kebutuhan.

¹² Mendidik kemenakan adalah salah satu kewajiban dari seorang mamak, baik itu pendidikan moral, mengajar nilai dan norma adat. Pendidikan agama bahkan juga mengenai pendidikan formal, seorang mamak harus mengupayakan bagaimana caranya agar pendidikan kemenakan dapat dioptimalkan dan baik itu sektor formal maupun informal. Yang tak kalah penting adalah mamak memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin bagi para kemenakannya hal ini juga proses mendidik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah gadang.¹⁴

2. Penghulu andiko adalah seseorang yang disepakati meyang gelar sako datuk dalam satu kaum yang terdiri dari beberapa paruik¹⁵ (adakalanya hanya satu paruik saja). Ada yang menyebut level ini sebagai tuo indu atau pangka tuo dalam suku kacik¹⁶ sebagai mamak kepala waris. Mamak kepala waris adalah pemimpin informal dalam kaum yang berperan memelihara keutuhan kaum dengan cara memelihara sako dan pusako karena kedua hal tersebut merupakan bagian terpenting sebagai identitas suatu kaum.¹⁷

3. Kepala suku atau kepala pucuk (mamak kaum) adalah seseorang penyangg gelar sako datuk berwenang terhadap pengawasan datuk-datuk andiko serta pusako tinggi dalam suku gadang.¹⁸ Menentukan dan menindaklanjuti pelanggaran adat, mendidik dan memelihara anak kemenakan dan menjaga keutuhan adat salingka nagari. Penghulu adalah

¹³ Di zaman dahulu jodoh kemenakan ada di tangan mamak, kemenakan hanya bisa menerima siapa yang akan dijodohkan dengannya apabila kemenakan sudah cukup umur maka mamak sudah siap dalam mencari jodohnya

¹⁴ Mamak tungganai juga bertanggung jawab mencari jalan keluar apabila terjadi konflik dalam rumah gadang. Maksudnya seorang mamak harus bijak dalam menyelesaikannya dan mencari jalan keluar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

¹⁵ Sapauiik berarti berasal dari perut seorang ibunya nenek (*gaek*)

¹⁶ Suku kacik adalah pecahan dari suku besar atau suku asal pada suatu Nagari. Penghulu-penghulu andiko ini dalam suatu kampung terdiri dari beberapa orang, merekalah yang barat sepikul ringin sajijing dalam sebuah suku gadang (besar).

¹⁷ Edison Piliang, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2013), hlm. 309.

¹⁸ Bustamam. Dt. Manidiah, *Op. Cit*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang memegang hulu atau pangkal dari segala galanya (pemegang kekuasaan).¹⁹

Apabila terjadi konflik atau perselisihan pada keluarga, niniak mamak dijadikan oleh seseorang atau kemenakannya tempat bertanya, menjadi penengah dan mencari jalan keluar dengan damai secara kekeluargaan. Sesuai dengan istilah adat Minangkabau *niniak mamak nan gadang basa batuah, urang nan cadiak tau pandai, candokio arif bijaksana maukua adia bakato bana, manimbang samo barek, maukua samo panjang, indak kuniang dek kunik, indak lamak dek santan kaduonyo badantiang-dantiang, tangangnyo maleo-leo (tegas dan bijaksana).*²⁰ Niniak mamak dijadikan utusan bagi seseorang dalam menyelesaikan masalah untuk bermusyawarah atau berunding mendapatkan kesepakatan jalan tengah atau kedamaian.

Menurut M. Jamil ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Sebaliknya tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut orang banyak tanpa persetujuan ninik mamak yang gadang basa batuah (yang dibesarkan dan dituakan). Contohnya: *Batando* (bertukar cincin).²¹

¹⁹ Edison Piliang, *Op. Cit*, hlm. 183.

²⁰ Penjelasan dari pepatah adat tersebut adalah ninik mamak yang besar berkarismatik, orang yang cerdas dan pandai, memutuskan dengan arif bijaksana dan berkata benar, menimbang sama berat, mengukur sama panjang, tidak kuning karna kunyit, tidak enak sama santan keduanya, tegas dan bijaksana.

²¹ M. Jamil, *Dilema Pemangku Adat Minangkabau: Sebuah Realita Kepemimpinan Mamak Kini*, (Bukittingi: Cinta Buku Agency, 2015), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di sisi lain mamak datuk, mamak tungganai (pemimpin rumah gadang) serta mamak lainnya yang sudah menikah berperan sebagai bapak dari anak-anaknya. Secara tradisional sumando (suami saudara perempuan) dilingkungan keluarga istrinya tidak ada tuntutan kecuali untuk kepentingan keturunan, karena istri dan anak-anaknya sudah dipertanggung jawabkan oleh saudara laki-laki (mamak). Seorang ayah mempunyai dua fungsi; 1. Sebagai ayah biologis dari anak-anaknya sendiri, 2. Sebagai ayah sosiologis yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dari saudara perempuannya.²²

Dari beberapa masalah yang peneliti dapatkan yaitu ada beberapa perubahan yang terjadi terhadap kedudukan mamak di Kamang Mudik yaitu:

1. Memelihara anak kemenakan, sekarang dalam memelihara anak kemenakan sudah ambil alih oleh orang tua, dan dalam pendidikan untuk anak kemenakan sudah diambil alih oleh pendidikan formal.
2. Dalam perkawinan, ninik mamak sudah tidak sepenuhnya menentukan jodoh untuk anak kemenakannya. Sudah jarang ditemui mamak yang menjodohkan kemenakannya.
3. Dalam menyelesaikan sengketa, Ninik mamak bukan satu-satunya yang bisa mengambil keputusan akhir dalam masalah sengketa dalam masyarakat. Dalam penyelesaian perkara misalnya di Nagari Kamang Mudik biasanya diselesaikan di tingkat bawah sampai ke tingkat paling atas, di tingkat bawah diselesaikan oleh mamak sebagai juru damai

²² Wawancara dengan Ahamad Latif Dt. Samiak di Durian Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 8 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hakam) sesuai dengan jenjang kepemimpinan dalam adat Minangkabau. Pergeseran peran mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik dalam menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan hukum keluarga (nikah, cerai, talak, rujuk dan harta warisan) pun terjadi. Saat sekarang ini tidak semua perkara dalam rumah gadang mamak bisa langsung untuk menyelesaikannya, mamak akan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu untuk bisa masuk dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mamak hanya bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kelompok orang (hubungan sosial antar kelompok orang), bukan masalah individu yang berhubungan dengan syarak. Contoh permasalahan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin antara suami istri, dalam hal ini mamak tidak bisa masuk untuk menyelesaikannya. Anak lebih cenderung mengadu kepada orang tuanya (ayah) setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dan ayah yang langsung menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini di pengaruhi oleh faktor kedekatan ayah lebih dekat dengan anak di banding mamak.²³

4. Memelihara harta pusaka, peran ninik mamak dalam memelihara harta pusaka kurang berjalan, karena banyak harta pusaka yang dijual. Dan harta pusaka yang digarap oleh mamak dan hasilnya untuk kebutuhan anak dan istrinya.

²³ Wawancara dengan P Dt. Rajo Imbang di Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 08 Juli 2019

Islam mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perselisihan yang terdapat dalam Alquran baik dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun non pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan oleh hakim. Di dalam Alquran sendiri konsep hakim dengan berbagai bentuknya disebut dalam tujuh surat. Sedangkan yang menyebut hakim sendiri terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35, yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perselisihan dalam keluarga dengan mengangkat seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Secara bahasa kata hakim asal مَنَعَ مَنَعًا لِإِصْلَاحٍ maknanya secara istilah “mencegah sesuatu perbuatan untuk islah (kemaslahatan).²⁴ Hakim dapat disebut juga الْقَضَاءُ “ketentuan”²⁵ menurut istilah hakim diartikan:

مَنْ يُخْتَارُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ “orang yang dipilih atau ditunjuk untuk menyelesaikan dua orang yang berselisih paham”.²⁶

Pengutusan hakim dimaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya perselisihan, hakim berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut agar suami istri dapat berdamai kembali. M.A, Tihani dan Sohari Sahrani yang mendefinisikan hakim artinya juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara

²⁴ Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad terkenal dengan nama al-Rhagib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, jilid ke-1, (tt: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, tth), hlm. 167.

²⁵ *Al-Mu'jam al-Wajiz*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1994), hlm. 165

²⁶ Sa'ad Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1419H/1998 M), hlm. 96 lihat juga; Muhammad 'Ali Shabuny, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Cet. ke-3, (Beirut: Muassasah Manahil al-Irfani, 1400H/1980 M), hlm. 464.

kedua suami istri tersebut.²⁷

Di dalam Alquran permasalahan peran hakam dalam menyelesaikan perselisihan terdapat dalam surat al-Nisa' (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S al- Nisa' (04):35)²⁸

Dalam surat al-Nisa' ayat 35, dinyatakan bahwa hakam itu berasal dari keluarga belah pihak. Pernyataan bahwa hakam dari keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hakam disyaratkan berasal dari kalangan suami dan istri. Meski pada prinsipnya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa. Tujuan pemutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami dan istri, hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Di dalam Alquran tidak ada ayat yang memerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga karena

²⁷ M. A. Tihami, Sohari Sobani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.189

²⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009), hlm. 84.

perceraian sangat di benci oleh Allah Swt, melainkan di cari jalan keluar dengan proses damai.²⁹

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat al- Nisa' ayat 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.(Q.S al-Nisa'(04):114)³⁰

Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kebolehan seseorang menjadi hakim, akan tetapi terdapat kalimat yang menegaskan bahwa orang yang menyuruh (manusia) mengadakan perdamaian diantara manusia karena mencari keridhoan Allah maka kelak akan diberi pahala yang besar. Apabila dikaitkan dengan posisi hakim maka tujuan pengangkatan seorang hakim bersesuaian dengan ketentuan ayat tersebut, karena keberadaan hakim untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengadakan perdamaian diantara para pihak, oleh sebab itu ayat tersebut dapat menjadi landasan diangkatnya seorang hakim karena dalam perkembangan manusia dan seiring perubahan zaman tentunya banyak terjadi perubahan bahkan terdapat permasalahan-permasalahan baru yang tidak

²⁹ Ahmad Mustofa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, jilid v, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 49.

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 97.

mempunyai hukum. Tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka manusia berhak penuh mengaturnya, termasuk ke dalam kategori yang tidak diatur oleh hukum Islam.³¹

Wahbah az-Zuhaili³² menyatakan bahwa akan lebih bijak bila hakam berasal dari pihak keluarga masing-masing suami dan istri, namun keterlibatan pihak-pihak luar bisa saja terjadi:

“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga suami dan istri, hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga. Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami dan istri, yang mengetahui betul keadaan suami dan istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.³³

Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi menyatakan lafaz “wa in khiftum” (jika kamu khawatir)” ditujukan pada hakim dan pemerintah/penguasa. Prioritas utama, hakam dari pihak keluarga suami dan istri, bila tidak ada maka bisa diutus orang lain yang ‘adil dan alim. Dua orang hakam yang diangkat juga harus jauh dari subjektivitas maupun tendensi keberpihakan, memiliki itikad baik dan tulus untuk tidak saling menyalahkan atau berorientasi memenangkan pendapat pribadi, serta

³¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 278.

³² Syaikh Wahbah az-Zuhaili lahir tanggal 6 Maret 1932, daerah Qalamin, Damaskus, Suriah. Pada Sabtu (8 Agustus 2015) dikabarkan berpulang di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Wahbah az-Zuhaili mengarang lebih dari 200 kitab. Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah; *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu dan Tafsir al-Munir. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. <https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/> (di akses pada tanggal 13 Oktober 2019).

³³ Wahbah Zuhail, *Al-fiqh al-Islami Waadillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr al- Mu asir, t.t), hlm. 828.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bisa dipercaya untuk menjaga amanat atau hal-hal rahasia dalam rumah tangga suami istri yang bertikai.³⁴

Berkaitan dengan hal ini, penulis mendapatkan realita kasus kedudukan mamak sebagai hakam dalam menyelesaikan perselisihan suami dan istri di Nagari Kamang Mudik, yaitu: Mimi Sulastri berusia (27 th) dan Dendi Aprio (32 th), pasangan suami istri ini telah menikah selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 1 tahun lebih, dalam rumah tangga mereka dari awal menikah sampai 2 tahun dianggap baik tidak ada konflik diantara mereka, namun lama kelamaan muncul perselisihan yang bermula adanya adu mulut antara keduanya, dan merembes kemana-mana. Suami langsung keluar dari rumah dan tidak pulang-pulang lagi ke rumah istrinya. Pertengkaran antara mereka tidak kunjung selesai, pada akhirnya keluarga istri mencari jalan keluarnya untuk menjemput kembali suami Mimi yang keluar dari rumah, pertama diselesaikan oleh walinya (ayah). Karena tidak berhasil, Mimi menemui mamak rumahnya untuk bisa mencari jalan keluar dari pertengkerannya, setelah diskusi dengan mamak rumahnya mamak rumah mengusulkan untuk menemui mamak kepala suku (kaum), keluarga sepakat dan membicarakan masalah ini kepada mamak kepala suku (kaum) karena dianggap berpengaruh dan bisa memberikan solusi terbaik. Mamak tersebut yang menyelesaikan pertikaian mereka, dengan menasehati kemenakannya dan berbicara langsung dengan mamak sang suami. Dalam penyelesaiannya, kedua mamak menyuruh balik dan bersatu kembali antara mimi

³⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Juz III, (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1412H/1992 M), hlm. 56

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan Dendi Aprio, salah satu dari pihak keluarga mimi menemani mimi untuk menyempul suaminya.³⁵

Dewasa ini perubahan sosial telah terjadi dalam lingkungan adat Minangkabau. Peran mamak mulai terasa berkurang, mamak lebih berperan sebagai bapak dalam keluarga istrinya. Posisi peran mamak mulai berubah misalnya dalam menyelesaikan konflik keluarga di Nagari Kamang Mudik. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kemenakan, saat sekarang ini ayah lebih berperan menyelesaikan permasalahan anaknya. Posisi dan peran mamak pun mulai berubah misalnya dalam membimbing kemenakannya, seharusnya yang bertanggung jawab dalam pendidikan kemenakan adalah mamak. Tapi peran tersebut sekarang lebih banyak diambil alih oleh ayah.³⁶ Hal ini tentu saja berubah dari yang seharusnya karena dalam keluarga di Minangkabau peran mamak sangat penting dan dibutuhkan. Posisi dan peran mamak pun mulai bergeser tidak lagi seperti semestinya.

Zaman berganti masa berubah, “*Sakali aia gadang datang sakali tapian barubah*”. Sekaligus hukum alam yang senantiasa berkembang setiap waktu. Perputaran waktu berjalan secara cepat. Jika ninik mamak tidak bisa mengimbangi pengetahuan sesuai zaman maka kepemimpinan mamak akan ketinggalan. Sementara anak kemenakan dan masyarakat yang dipimpin sudah berhadapan dengan zaman

³⁵ Wawancara dengan Donri Dt. Sati di Kampuang Barangai Nagari Kamang Mudik, tanggal 9 Juli 2019

³⁶ Wawancara dengan P Dt. Rajo Imbang di Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 08 Juli 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serba canggih.³⁷

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA ”.

B. Batasan masalah

Karena begitu luas pembahasan ini, maka penelitian ini dibatasi pada pergeseran kedudukan mamak sebagai hakam dalam hukum keluarga di Nagari Kamang Mudik Selain itu tidaklah menjadi fokus penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas, dapat dipahami yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan mamak sebagai hakam dalam menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga di nagarian Kamang Mudik. Untuk lebih tajamnya pembahasan ini, maka ia di bagi kepada tiga sub masalah berikut:

1. Bagaimana kedudukan mamak sebagai hakam dalam adat Nagari Kamang Mudik?
2. Mengapa terjadi pergeseran peranan mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik ?
3. Bagaimana kedudukan mamak sebagai hakam menurut hukum Islam?

³⁷ M. Jamil, *Op. Cit*, hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan mamak sebagai hakam dalam adat Nagari Kamang Mudik
- b. Untuk mengetahui mengapa terjadi pergeseran peranan mamak sebagai hakam di Nagari Kamang Mudik
- c. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan mamak sebagai hakam menurut hukum Islam

Sedangkan Manfaat penelitian ini :

Sebagaimana lazimnya suatu pembahasan mempunyai kegunaan dan manfaat, dalam pembahasan tesis ini manfaatnya antara lain.

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritisnya dimaksudkan agar dapat memperluas pengetahuan dan penjelesan bagi mahasiswa, masyarakat umum, khususnya peneliti pribadi terhadap Kedudukan mamak dalam masyarakat adat Nagari Kamang Mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam menambah keilmuan pada kepustakaan PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berkaitan dengan kedudukan mamak dalam masyarakat adat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Kamang Mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergesran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga. Untuk menambah cakrawala berfikir yang logis, sekaligus tambahan informasi yang bernilai ilmiah.

- c. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program PascaSarjana Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mngambil judul “Kedudukan mamak dalam masyarakat adat Nagari Kamang Mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga.” Untuk memperjelas maksud dari judul penulisan ini dan menghindari terjadinya kesalah fahaman, maka penulisan mencantumkan penjelasan istilah pada judul di atas, yakni sebagaimana dalam definisi berikut ini:

1. *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu baik adik atau kakak dari ibu yang berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dari saudara perempuannya (matrilineal). Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu dengan yang muda. Apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, namun mempunyai anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Nagari merupakan wilayah yang mempunyai batas persukuan, dalam hal ini adalah Nagari Kamang Mudik.
3. Kewenangan adalah suatu kewajiban (tanggung jawab) yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah wewenang seorang mamak dalam adat Nagarin Kamang Mudik
4. Hakam, hakam disini adalah mamak yang bertanggung jawab terhadap kemenekan sebagai penengah atau yang menyelesaikan perselisihan.

F. Sistematika

Pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut.

BAB I : Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan sistematika Pembahasan. Secara esensial, yang dibicarakan dalam bab ini adalah kedudukan mamak sebagai hakam dalam masyarakat adat Nagari Kamang Mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga secara umum..

BAB II : Menjelaskan tinjauan umum tentang mamak yang meliputi pengertian mamak, kewenangan mamak, macam-macam mamak, konsep pergeseran. Serta mamak sebagai hakam, pengertian hakam, sejarah hakam dalam perkawinan ,tugas dan fungsi hakam, penelitian terdahulu dan gambaran umum lokasi penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB III** : Dalam bab III ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan data, instrumen penelitian, pengecekan keabsahan data, subjek penelitian, informasi penelitian dan metode analisis data.
- BAB IV** : Membicarakan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan mamak sebagai hakam dalam masyarakat adat Nagari Kamang Mudik, faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran fungsi dan peranan mamak sebagai hakam, tinjauan hukum Islam tentang kedudukan mamak sebagai hakam,
- BAB V** : Di dalamnya meliputi kesimpulan dari hasil analisis terhadap kedudukan mamak dalam masyarakat adat Nagari Kamang mudik analisa terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga, selanjutnya saran dan kritik dari semua jajaran Dosen khususnya program studi Hukum Keluarga (Syariah Ahwal Syakhsiyyah) sangat kami harapkan untuk membangun serta menambah pemikiran dan pengetahuan baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Mamak Menurut Adat.

1. Pengertian Mamak

Mamak adalah status dan juga merupakan institusi, yang diberikan kepada laki-laki dalam keluarga ibu; yakni saudara laki-laki ibu, bapak saudara sebelah ibu, dan anak laki-laki dari pihak sebelah ibu.³⁸

Hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus keatas, anak perempuan lurus ke bawah).³⁹ Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak-anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut⁴⁰

Menurut adat Minangkabau, bagi seorang laki-laki yang paling dekat kepadanya adalah kemenakannya, yang menurut hukum adat harus mewaris gelar,

³⁸ Nurwani Idris, *Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (JurnalOnline), dalam [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03%20nurwani%20Hubungan%20Ninik%20Mamak%20\(Revisi-4\)%20edit%20mita.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03%20nurwani%20Hubungan%20Ninik%20Mamak%20(Revisi-4)%20edit%20mita.pdf) (diakses pada tanggal 06 Oktober 2019)

³⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 115.

⁴⁰ Sri Sudaryatmi, Sukirno, T.H. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000), hlm. 14

martabat, kekayaan dan apa saja yang dipunyai mamaknya. Sebaliknya, anaknya sendiri menurut adat bukan seorang anaknya yang sesuku dengan dia dan karena itu menurut hukum adat tidak pusaka mempusakai. Saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya.⁴¹

Anak-anak dari saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamaknya atas apa yang telah diberikan mamaknya. Hal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dengan kemenakan, sehingga akhirnya menimbulkan suatu tertib aturan bermamak berkemenakan. Tertib bermamak berkemenakan ini hanya merupakan konsekuensi saja dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal.⁴²

Adat Minangkabau mengajarkan, bahwa yang dimaksud kemenakan ialah Laki-laki atau perempuan dari pihak ibu yang dipertanggungjawabkan oleh mamaknya.

Kemenakan terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu :

1. Kemenakan bertali darah, yaitu kemenakan kandung yaitu anak-anak dari saudara-saudara perempuan mamak.
2. Kemenakan bertali sutera, yaitu kemenakan jurai yang lain tapi masih berhubungan darah dengan jurai mamak.

⁴¹ Ibid. hlm. 15

⁴² Edison Piliang, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Krisna Multimedia, 2013), hlm. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kemenakan bertali emas, yaitu kemenakan di bawah lutut, orang yang bekerja pada kita dengan diberi mas (uang) dan dengan persetujuannya dijadikan kemenakan.
4. Kemenakan bertali budi, yaitu orang-orang yang hidup, mencengkam terbang menumpu terjadi dari orang-orang yang pindah dari tempat asalnya ke tempat baru dan di tempat yang baru mencari mamak baru.⁴³

Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari saudara perempuan dipimpin oleh mamak (saudara laki-laki tertua dari ibu, seperti juga si ayah merupakan mamak bagi kemenakan- kemenakannya di dalam paruknya). Anak-anak dari saudara perempuan dididik, diasuh dan dipimpin oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamak mereka. Oleh karena itu timbullah kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan.⁴⁴

Dalam kesatuan serumah, kepalanya disebut *mamak rumah*. Walaupun sebutan ini dapat digunakan untuk setiap lelaki dewasa di rumah itu, namun sebagai kepala kesatuan adalah laki-laki tertua atau laki-laki tertua dari ibu tertua dalam kesatuan itu, meskipun dalam kesatuan bukan ia yang tertua. Dalam *jurai* kepalanya disebut mamak *jurai*, yaitu saudara laki-laki yang tertua dari Ibu semua anak laki-laki dan perempuan

⁴³ N.M. Rangkoto, Dt Bandaro, *Hubungan Mamak Dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang Serta Pasambahan Adat*, (Bukittinggi, 1984), hlm. 7

⁴⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ibu serta saudara-saudara perempuan lain dari ibu adalah kemenakan *mamak*. Kepala paruik disebut Tungganai atau mamak kepala waris dalam hal ini sebagai pemegang harta pusaka. Tungganai dipilih dari anggota tertua dari jurai atau rumah tertua dalam paruik itu. Semua anggota paruik yang berada di bawah perlindungan kepala kesatuan tersebut juga dinamakan *sapayuang* atau *sapalinduangan*. Adapun kepala dari kesatuan suku dinamakan penghulu suku dengan pangkat *andiko* dan sebutan *datuk*.⁴⁵

Masyarakat Minangkabau disusun menurut kesukuan, yaitu kesatuan atas dasar keturunan, yang mengikuti garis perempuan atau ibu. Karena keturunan hanya dihitung menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut *matrilineal*.⁴⁶ Sistem kekerabatan *matrilineal* bersifat alamiah dan merupakan bentuk yang asli di Minangkabau. Walaupun mendapat pengaruh yang datang kemudian dari luar, sistem ini terus bertahan meski banyak mengalami perubahan dalam bentuknya.⁴⁷

Dalam penentuan batas-batas kekerabatan, garis yang ditarik adalah garis yang berhubungan dengan ibu, dan asing orang yang berada di luar garis ke ibuan tersebut. Karena menganggap orang yang berada digaris keibuan tersebut sebagai keluarga, maka dalam mencari jodoh dari anggota tersebut harus didatangkan dari luar, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga kawin *semenda*⁴⁸ yang ada di Minangkabau dapat

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*., hlm. 188

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cetakan-1, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 182-183

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 184-185

⁴⁸ Kawin *semenda* adalah perkawinan dengan mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan dengan maksud menghasilkan keturunan yang akan mengembangkan anggota kelompok ini. suami yang didatangkan dari luar itu disebut sebagai *urang sumando* dan ia tetap menjadi anggota kelompok ibunya. Untuk maksud pengembangan keturunan itu, yang diperlukan hanya bapak *biologis* bukan bapak sosial, sehingga status sosial dari si ayah tidak diperhitungkan. Walaupun sering penjemputan suami yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan merupakan perkawinan *aksogami* yaitu keharusan kawin dengan orang yang berada di luar kekerabatan *matrilineal*. Adat yang berlaku dalam hal tempat menetap keluarga adalah secara *matrilokal*, yaitu suami, anak dan istrinya menetap di rumah keluarga pihak istri. Suami pulang ke rumah istrinya biasanya pada waktu malam, sedangkan di siang hari ia menghabiskan waktu dirumah ibunya, bekerja untuk menghidupi kemenakan dan memperkaya harta pusaka kaumnya. Ini mengakibatkan hubungan ayah dan anak tidak erat. Anak lebih rapat dan membutuhkan ibu.⁴⁹

Peranan *urang sumando* di rumah istrinya adalah untuk menghasilkan keturunan untuk menambah jumlah anggota kelompok *matrilineal* istrinya, dan tidak akan menambah anggota kelompoknya sendiri. Anak-anak tumbuh dan berkembang di rumah istrinya bersama – sama dengan anak yang dilahirkan oleh wanita lain dirumah itu. sehingga anak-anak lebih rapat hubungannya dengan kerabat *matrilineal* ibunya. Kerabat garis keatas yang diketahuinya adalah garis kerabat yang melalui ibunya itu serta menganggap bahwa anggota keluarganya adalah orang – orang yang dihubungkan keatas melalui garis perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *matrilokal* merupakan salah satu unsur pendukung sistem kekerabatan *matrilineal*.⁵⁰

Dalam membatasi lingkungan kerabat yang bisa berpartisipasi dalam hak-hak kewajiban, yang diperhitungkan adalah garis keturunan yang meliputi kerabat-kerabat yang bergaris perempuan. Sehingga beban dan tanggung jawab terpikul pada anggota

berkerabat baik, namun itu hanya msekedar untuk mendapatkan bibit yang baik, bukan menghubungkan anak kepada ayahnya. *Ibid.*, h. 185

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 185-186

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 186

kerabat dari garis ibu, bukan pada ayah atau suami. Dalam susunan masyarakat adat Minangkabau adanya istilah *saparuik* (satu perut). *Saparuik* merupakan kesatuan yang berasal dari rumah gadang yang sama dan ia adalah bagian dari suku. Jika rumah gadang itu masih berdiri, tidak terlalu sulit bagi anggota *saparuik* untuk mengetahui adanya ikatan di antara mereka. Tetapi bila rumah gadang itu sudah dibongkar dan mereka diamai adalah rumah kecil terpisah, maka mulai kaburlah membayangkan ikatan tersebut apabila antara yang satu dengan yang lainnya berjarak lebih dari tiga tingkat. Adapun satuan terkecil dari kesatuan genealogis ini adalah kesatuan serumah, yaitu satu kesatuan yang mendiami satu rumah yang terdiri dari tiga generasi dan makan dalam satu paruik.⁵¹

Dalam perkembangan masa, dengan bertambahnya anggota *saparuik* tadi, maka ia membelah diri menjadi beberapa buah jurai. Jurai merupakan kesatuan yang lebih luas dari beberapa rumah dan merupakan cabang dari kesatuan paruik. Jika anggota-anggota *paruik* terus berkembang begitu banyaknya sepanjang masa, maka dijumpai suatu lingkungan yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu, lingkungan ini disebut suku. Yang mengikat suku hanyalah pertalian darah, ia sama sekali tidak terikat kepada suatu daerah tertentu. Dimanapun anggota suku itu berada, ia tetap merasakan pertalian darah dengan seluruh *sanak-sanak* mereka yang sesuku. Kemudian beberapa buah suku bersama-sama menepati sebuah daerah yang disebut *nagari*. *Nagari* merupakan persekutua hukum yang tersusun berdasarkan faktor genealogis dan territorial. Di dalam *nagari* terdapat sekurang

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum.*, hlm. 186-187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kurangnya empat buah suku.⁵²

Walupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, yang berkuasa dalam setiap kesatuan itu adalah seorang laki – laki tertua dari garis ibu yang kekuasaannya selalu didasarkan atas kata mufakat.⁵³

Adat Minangkabau memakai falsafah alam, yaitu yang berdasarkan kepada kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam.⁵⁴ Ajaran adat dan pandangan hidup orang Minangkabau yang dinukilkan dalam pepatah, petiti, petuah serta lain lainnya mengambil ungkapan dalam bentuk, sifat dan kehidupan alam. Semua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya, saling berhubungan tapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling menyalpkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Masing – masing hidup dan eksistensinya dalam suatu harmoni dinamis sesuai dengan dialektika alam yang dinamakan *bakarano bakajadian*.⁵⁵

Alam dan segala unurnya dikiaskan kepada kehidupan orang Minangkabau, sebagaimana mereka mengkiaskan alam sebagai tanah air Minangkabau, pemahaman unsur alam bermakna sebagai lembaga atau individu dalam masyarakat mereka. Masing – masing berhak mempertahankan eksistensi dalam perjalanan hidupnya. Setiap lembaga berkewajiban untuk memelihara eksistensinya individu dalam

⁵² Chairul Anwar, *Menidjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Segara, 1967), hlm 11-13

⁵³ *Ibid.*, hlm. 187

⁵⁴ Pepatah adat mengatakan :
Panakik pisau sirauik
Ambiak galah batang lintabuang
Salodang ambiak ka niru
Satitiak jadikan lauik
Sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadikan guru.

Ibid., hlm. 142.

⁵⁵ A.A. Navis, *Alam Terkambang*, hlm. 59-60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaganya masing – masing, dan setiap individu berkewajiban memelihara eksistensi lembaganya. Harmoni dipahami sebagai keselarasan hidup sesama lembaga dan individu atau sebaliknya. Karena setiap lembaga atau individu berbeda dalam kadar dan perannya mereka tidak akan dapat bersatu dengan yang lain, tetapi akan tetap sama dengan yang lain. Jadi dalam dinamika harmoni, mereka dalam masing – masing menjadi satu untuk bersama serta masing – masing menjadi sama untuk bersendiri – sendiri.⁵⁶

Di Minangkabau terdapat empat tingkatan adat. Keeempatnya adalah⁵⁷ :

1. Adat nan sabana adat, yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat *ilahi*, atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat air membasahi, adat api membakar, adat laut berombak. Dengan masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Minangkabau, ajaran yang berdasarkan kepada wahyu Allah itu diakui sebagai sesuatu yang pasti pastinya kenyataan yang berlaku dalam alam. Dengan demikian ajaran Islam di masukkan kedalam kelompok adat nan sabana adat, ini bukan berarti menjadikannya setara dengan adat atau bagian dari adat, melainkan kedudukannya yang tertinggi sebagai pedoman dalam kehidupan. Adat nan sabana adat ini, dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang

⁵⁶ Mamangan mereka mengatakan nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumbah paunyi rumah, nan kuaik pambao baban, nan binguang disuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang. Ini menyiratkan bahwa walupun fungsi dan peran manusia berbeda menurut kodratnya tetapi nilainya tetap sama karena mereka sama – sama dibutuhkan. *Ibid.*, hlm. 60

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum.*, hlm. 143-146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia. Adat yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan yaitu adat Ciptaan Tuhan Maha Pencipta.⁵⁸

2. Adat yang diadatkan, yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang mula menepati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Seperti yang terdapat dalam undang – undang *nan duo puluh* dan *cupak nan duo*. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat ini adalah *adat nan sabana adat*.⁵⁹

3. Adat yang teradat, yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat juga hilang menurut kepentingan. Kebiasaan ini mulanya dirumuskan oleh niniak mamak pemangku adat dalam satu – satu *nagari* untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Penyimpangan dalam bentuk adat ini, hanya akan dianggap ganjil oleh lingkungan yang memakai adat tersebut dan oleh lingkungan lain mungkin tidak.⁶⁰

Perbedaan dengan adat yang diadatkan terletak pada segi keumuman berlakunya. Adat yang diadatkan pemakaiannya bersifat umum yang berlaku dan diakui di seluruh Minangkabau, seperti adat *matrilokal*. Namun pelaksanaan adat *matrilokal* (adat yang teradat) dapat berbeda dalam *nagari – nagari* seperti malam ke bertama sesudah nikah suami diantarkan ke rumah istrinya, dan tata cara lain yang menyangkut pelaksanaan *matrilokal* tersebut.

⁵⁸ Hilma Adi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Bandar Maju, 2014), hlm. 10.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 146

⁶⁰ *Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adat istiadat, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Adat ini dibiasakan oleh *ninik mamak* pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan dan akhlak yang mulia. Seperti adat main layang – layang sesudah musim menyabit padi. Namun dalam pelaksanaan adat ini, yang tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya, kadang – kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum seperti kebiasaan mengadu ayam yang menjurus kepada penganiayaan binatang.⁶¹

Dalam penggunaan sehari - hari, ke empat tingkat adat itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, adat yang tersimpul di dalamnya *adat nan sabana* adat dan adat yang diadatkan. Kedua, istiadat yang tercakup di dalamnya adat yang teradat dan adat istiadat. Kesemuanya menyimpulkan kata adat istiadat Minangkabau. Dan kelompok pertama mempunyai kekuasaan dalam masyarakat dan ia dapat disebut hukum adat. Sedangkan kelompok kedua yang banyak bersifat tuntutan tingkah laku yang baik, tidak dapat disebut hukum.⁶²

Adat nan sabana adat dan adat yang diadatkan tidak mengalami perubahan, tidak berubahnya kodrat *ilahi* dan *azalinya* wahyu Allah. Disini berlaku pepatah adat *indak lapuak dek hujan, indak langkang dek paneh, diasak indak layua, dicabuik indak mati*. Adat ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebab didasarkan kepada ayat – ayat Allah yang terdapat dalam alam. Adat yang tidak mengalami perubahan ini

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, hlm. 143-146.

⁶² *Ibid.*, hlm. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibaratkan dengan adat bersimpul mati. Maksudnya disamping dapat mengikat kuat, simpulnya juga tidak akan dapat di buka oleh siapapun.⁶³

Sedangkan adat yang teradat dan adat istiadat dapat mengalami perubahan seperti kata pepatah *sakali ais gadang sakali tapian barubah*. Sebab keduanya dirumuskan oleh *ninik* pemuka adat sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Adat yang bisa mengalami perubahan ini disebut adat bersimpul sintak, yang berarti kuat dan dapat mengikat namun bagi yang mengetahuinya mudah membuka simpul itu.⁶⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat adat Minangkabau adalah tetap dan berubah, yang dalam pepatah disebutkan *sakali aia gadang sakali tapian barubah namun baaliah kasitu juo*.⁶⁵ Kata adat dalam pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan sesamanya.⁶⁶

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶⁷ Menurut Supomo dan Hazairin bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota

⁶³ *Ibid.*, hlm. 150

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 150-151

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 151 maksud dari pepatah tersebut adalah sekali air besar sekali tepian berubah namun kembali kesitu juga artinya sekali air besar merubah tepian tetapi akan kembali kisitu juga walaupun tepian sudah dirubah oleh air besar.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

⁶⁷ <http://kbbsi.web.id/masyarakat.html> (diakses pada tanggal 7 September 2019 pukul 17:16 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat itu, maupun keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran adat yang di tetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.⁶⁸

Masyarakat hukum adat dapat kita artikan sebagai masyarakat yang hidup bersama, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan tertentu secara bersamaan yang diyakini bahwa setiap kepentingan pribadi (individu) disesuaikan dengan kepentingan bersama atau kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, yang dapat kita lihat dalam kehidupan bergotong royong, mendirikan tempat ibadah dan sarana prasana untuk kepentingan bersama. Sehingga tingkah laku dan perbuatan dari setiap individu diatur dan patuh terhadap norma-norma adat yang berlaku, yang telah disepakati bersama dengan pimpinan adat.

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir abad ke-19⁶⁹ merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.⁷⁰

Surjono Soakanto (1976) menulis bahwa: hukum adat pada hakikatnya adalah kebiasaan, kebiasaan itu mempunyai akibat hukum (*seinsolen*). Berbeda dengan kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 17&19.

⁶⁹ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985,) hlm 9.

Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*Rechtsvordigeordening der samen leving*”.⁷¹

Di kalangan masyarakat istilah “hukum adat” jarang digunakan, yang lazim digunakan adalah “adat” saja. Adat berarti kebiasaan di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah “Odor” (*eudeut*), Minangkabau Lembaga/adat lembaga, Minahasa dan Maluku menggunakan istilah “adat kebiasaan”, Batak Karo menggunakan istilah “basa” (bicara), dan Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah “ngadat” untuk menggambarkan istilah hukum adat.⁷²

Pada dasarnya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dapat dibagi 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) dan pertalian keturunan (*genealogis*). Masyarakat hukum teritorial adalah bagian clan yang berdiri dan terbatas oleh terikatnya bersama-sama dengan bumi didusunnya atau daerahnya sendiri, yang menjalin suatu ikatan yang terus berlaku dan menghimpun golongan-golongan kerabat yang bersama berdiam di situ tapi satu sama lain bukan sanak-saudara (bagian dari berbagai clan menjadi masyarakat hukum dan satu kesatuan).⁷³

Masyarakat hukum adat berdasarkan lingkungan daerah teritorial adalah masyarakat yang hidup bersama dalam satu lingkungan, yang telah lama menjalin

Kastulani, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hlm. 6.

⁷² Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, (Yogyakarta, Leberty, 1985), hlm. 5.

⁷³ B. Ter Haar Bzn, penerjemah Soebakti Poesponopo, *Asas-Asas dan Susunan Hukum*, (Jakarta: Pt Pradya Paramita, 1994), hlm. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu ikatan hubungan sosial karena sudah lama tinggal atau menetap di lingkungan tersebut sejak dari orang tua samapai nenek moyang yang mempunyai tanah dan tempat tinggal masing-masing dalam satu lingkungan.

Masyarakat hukum adat berdasarkan pertalian keturunan (*genealogis*) adalah masyarakat hukum adat yang hidup dalam satu lingkungan yang terikat pada suatu ikatan berdasarkan keturunan, baik keturunan berdasarkan garis ibu, atau keturunan berdasarkan garis ayah dan bisa berdasarkan keduanya ibu dan ayah.⁷⁴

Keturunan berarti hubungan yang terbentuk karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga melahirkan anak, dengan adanya anak terbentuk hubungan pertalian darah. Contoh keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ketika seorang anak yang telah dewasa kawin dia akan menghasilkan keturunan dalam perkawinannya berupa anak dan membentuk sebuah keluarga begitulah seterusnya.

Keluarga-keluarga yang sudah ada akan membentuk sebuah suku, anggota suku berdasarkan keturunan dari kerabat yang berhubungan pertalian darah dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Sehingga, suku yang telah terbentuk tidak akan punah dan terus berkembang dengan adanya generasi penerus.

Dalam susunan masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (*genealogis*), berarti: Seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenek

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm.105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultansyarif Kasim Riau

moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu.⁷⁵

Beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian hukum adat, dari kalangan para sarjana hukum diantaranya adalah:

1. Prof Dr. Supomo, SH memberikan pengertian tentang huku adat, sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan peraturan legislatif (*Unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan alat keyakinan bahwasanya peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁷⁶

2. Dr. Sukanto

Dalam bukunya “meninjau hukum adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai komplek adat istiadat yang kebanyakan tidak dikiblatkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat.⁷⁷

3. Prof Mr. C. Van Vollenhoven⁷⁸

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuatan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan belanda dahulu.

⁷⁵ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hlm.32.

⁷⁶ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung: Pt Alumni, 2013), hlm. 103.

⁷⁷ Kastulani, *Op. Cit*, hlm. 8.

⁷⁸ Meninggal pada tahun 1933 dalam usia yang relative muda, seorang yang berjasa dalam menegakan ilmu pengetahuan tentang hukum adat. Banyak buku dan tulisan yang ditinggalkan v. Vollenhoven an Prof. Ter Haar adalah salah satu muritnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mr. B. Terhaar Bzn.

a. Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan-keputusan berwibawa dari kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum; atau dalam hal bertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan keputusan itu kesewengan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan senafas, seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/ diakui atau setidaknya tidaknya ditoleransi olehnya.

b. Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah saja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas mempunyai wibawa (Match, Authority) serta pengaruh dalam pelaksanaannya belaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuhnya (fungsionaris meliputi ketiga kekuasaan yaitu : eksekutif, legislatif, yudikatif). Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dari keputusan –keputusan para fungsionaris hukum itu, bukan raja hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dilapangan agama, dan petugas-petugas desa lainnya⁷⁹

Oleh karena itu hukum adat adalah bagian dari adat dan adat istiadat, yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat untuk hidup lebih teratur dengan aturan yang dibuat oleh pemimpin adat, aturan tersebut mengikat masyarakatnya dan mempunyai sangsi- sangsi bagi yang melanggarnya dan

⁷⁹ Kastulani, *Op. Cit...*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan itu timbul dari masyarakat yang merupakan kongkritisasi dari pada kesadaran hukum. Dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat lahir dari perwujudan struktur kejiwaan dan cara berfikir, sehingga mempunyai sifat kebersamaan yang kuat yang artinya erat rasa kebersamaan, mempunyai corak pandangan hidup yang sama dan melahirkan sistem hukum yang kongkret untuk mengatur pergaulan hidup dan hukum ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Ada 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan dalam masyarakat hukum adat berdasarkan genealogis yang dikenal di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

a) Garis Keturunan Parental

Masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan didasarkan pada prinsip garis keturunan Bilateral adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu dan ayah yang diberi nilai dan derajat yang sama baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu. Prinsip garis keturunan ini dianut, antara lain oleh masyarakat hukum adat Bugis, Dayak di Kalimantan dan Jawa.⁸¹

b) Garis Keturunan Patrilineal

Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan Patrilineal murni adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki, sehingga setiap orang masuk ke dalam batas hubungan

⁸⁰ Yaswirman, *Op. Cit*, hlm. 177.

⁸¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya saja sedangkan semua kerabat ibunya berada di luar batas itu.⁸²

Prinsip garis keturunan murni dikenal pada masyarakat hukum adat Batak. Di samping prinsip garis keturunan patrilineal murni ada pula prinsip garis keturunan Patrilineal beralih-alih, yang sering dijumpai pada masyarakat hukum adat Bali dan Rejang. Dalam prinsip garis keturunan Patrilineal beralih-alih ada kemungkinan untuk menarik garis keturunan melalui penghubung seorang perempuan yaitu tergantung pada bentuk perkawinan yang dilakukan oleh penghubung itu. Pada masyarakat Patrilineal beralih-alih, bentuk perkawinan yang dilakukan adalah tanpa jujur, yang dikenal dengan sebutan perkawinan tanpa jujur. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan tanpa jujur tersebut, yaitu karena tidak mempunyai anak laki-laki sehingga patrilinealnya punah.⁸³

Perkawinan tanpa jujur berarti mengambil si suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si istri akan berkedudukan tetap sebagai anggota klannya dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui ayahnya (yang pada dasarnya telah menjadi anggota klan si istri, sehingga suaminya itu merupakan anak laki-laki dari ayahnya si istri).⁸⁴

Garis Keturunan Matrilineal

Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip garis keturunan Matrilineal adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang akan masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada di luar batas itu. Prinsip garis keturunan Matrilineal, dikenal pada masyarakat hukum adat Minangkabau.⁸⁵

Pada masyarakat Minangkabau, apabila ia perempuan maka hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan saja, dan selanjutnya piut laki-laki dan piut perempuan yang lahir dari cucu perempuannya. Seorang laki-laki Minangkabau dianggap tidak layak untuk memberikan keturunan kepada ibunya dan kerabat ibunya, ia hanya memperbanyak kerabat istrinya saja.

Berdasarkan tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan Matrilineal itu, maka dapat diuraikan bahwa dalam sebuah keluarga, ayah bukanlah termasuk anggota dari keluarga tersebut melainkan anggota dari paruihnya (berasal dari paruih seorang Gaek atau ibu dari nenek yang sama) sendiri dan tetap tinggal di dalam paruihnya.

2. Kewenangan Mamak

Kewenangan mamak dalam adat Minangkabau secara normatif adalah :

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 177

Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam pewarisan peran. Mengawasi pendidikan serta tempat bertanya oleh kemenakan dalam pendidikan.⁸⁶

Peran mamak dalam harta pusaka adalah memelihara, mengawasi memanfaatkan harta pusaka. Mempertahankan harta pusaka tetap ada sesuai dengan fungsi adat. Mamak juga bertanggung jawab dalam mengembangkan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya dan kemenakan-kemenakannya tetap terjamin.⁸⁷

- c. Peran mamak dalam pernikahan adalah mencari jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan perempuan, penanggung jawab atas kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.⁸⁸

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat hukum adat Minangkabau berlaku sistem Matrilineal atau sistem masyarakat keibuan, yang artinya setiap anggota masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui garis ibunya bukan dari ayahnya.

Sistem Matrilineal ini juga mempengaruhi sistem perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Dengan sistem perkawinan eksogami, maka kedua belah

⁸⁶ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2006), hlm. 181-183.

⁸⁷ Elizabeth E. Graves; penerjemah: Novi Andri, Leni Marlina, Nurasni, *Op. Cit.*, hlm.14

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm, 165.

pihak atau salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak lebur dalam satu keluarga karena masing-masing masih merupakan anggota dari *paruik*nya. Si suami masih menjadi anggota *paruik* atau kaumnya dan si istri juga masih menjadi anggota *paruik* atau kaumnya, sedangkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki akan menarik garis keturunan melalui ibunya dan keluarga ibunya serta berhak mewaris harta dari ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁹

Sistem perkawinan eksogami pada masyarakat Minangkabau melahirkan bentuk perkawinan *semendo*, dimana menurut pola perkawinan aslinya suami hanya dianggap sebagai “tamu” atau “orang *sumando*” yang datang menetap di rumah istrinya pada malam hari saja dan keesokan paginya kembali ke rumah orang tuanya, untuk bekerja mengolah tanah kepunyaan orang tuanya dan saudara-saudara perempuannya serta mempunyai tugas dan kewajiban sebagai *mamak* bagi anak-anak dari saudara-saudara perempuannya. Dengan keadaan demikian, yang akan memegang kekuasaan orang tua, memberikan pendidikan dan kesejahteraan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apabila hubungan anak-anak dengan ayahnya kurang rapat karena mereka hanya bertemu dengan ayahnya pada malam hari saja. Ikatan satu-satunya antara anak dan ayahnya ialah karena ayahnya itu adalah suami ibunya.⁹⁰

Disinilah pentingnya peranan saudara laki-laki dari pihak ibu yang disebut *mamak*. Dalam menyelesaikan masalah atau perkara *niniak* *mamak* telah dibekali ilmu dan dibimbing sebagaimana ditegaskan dalam syarak adat, *mamak* harus berdiri di jalan

⁸⁹ Yaswirman, *Op. Cit.*, hlm.125

⁹⁰ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau, (Padang: Indonesia, 1969), hlm. 59.

yang benar. Tidak berat sebelah dan harus bisa mencari solusi disetiap masalah anak kemenakannya.

Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa kedudukan dan peranan mamak sebagai berikut:

- a. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaum sesuai rumusan adat, *jadi panghulu sakato kaum, jadi rajo sakato alam* (jadi penghulu mufakat kaum, jadi raja mufakat alam)
- b. Sebagai pelindung bagi semua anggota kaumnya
- c. Sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya.⁹¹

3. Macam-macam Mamak

Seorang mamak dapat dibedakan menurut keturunan dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. Apabila dia merupakan saudara kandung dari ibu, dinamakan Mamak kandung.
- b. Apabila dia menjadi tungganai dari sebuah rumah, dia dinamakan mamak rumah atau tungganai rumah. Seseorang yang dituakan atau yang tertua dalam kelompok satu ibu (*urang nan saparui*) yang bertugas mengawasi dan memimpin anak kemenakan di rumah terutama kemenakan perempuan di rumah saudara perempuan (*dunsanak nan padusi*). Tungganai biasanya tidak bergelar datuk namun dia dipercaya oleh kemenakannya, tidak mementingkan

⁹¹ Amir M.S, *Op. Cit.*, hlm. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri sendiri, yang secara tulus memberikan perhatian dan pembinaan dan memimpin kemenakannya, dan pembinaan pada sanak keluarga atau kemenakannya.

- c. Apabila dia merupakan laki-laki tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu, meskipun rumah mereka telah terdiri 2 (dua), atau 3 (tiga) buah rumah, maka dia dinamakan mamak kepala waris.⁹² Mamak kepala waris pemimpin Informal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam suatu kaum

- d. Penghulu atau datuk (mamak kepala kaum) adalah setiap orang laki-laki yang diberi bergelar pusako (sako)-nya, diangkat oleh seluruh ahli kaumnya yang diberi gelar datuk. Asal kata pengertian penghulu berasal dari kata peng dan hulu, kata peng mengandung pengertian pemegang dan bersifat kebendaan. Sedangkan hulu adalah tangkai atau pangkal, jadi dapat diartikan penghulu adalah orang yang memegang hulu atau pangkal dari segala galanya (pemegang kekuasaan).⁹³

Ada 10 aitem ketentuan atau upaya kepemimpinan yang perlu menjadi perhatian oleh seorang yang menyandang gelar sako Datuk (penghulu) beserta perangkatnya yang termuat dalam aturan adat Minangkabau yaitu:

1. Manuruik alua nan luruih (menurut garis yang lurus). Seorang datuk kaum(suku) atau penghulu dalam melaksanakan amanah

⁹² N.M. Rangkoto, Dt. Bandaro, *Op. Cit.*, hlm. 6.
⁹³ Edison Piliang, *Op. Cit.*, hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah sumpah yang dijunjungnya harus menurut alua (garis)⁹⁴ ketentuan aturan dan kebenaran, artinya tidak boleh menyimpang dari aturan kebenaran yang bernilai kebaikan secara musyawarah mufakat. Wasiat adat mengatakan:

Balabeh Manahan cubo, bungka Manahan asah, ameh Manahan uji, taraju nan indak bapaliang, hukum adia Manahan bandiang, bajalan di nan pasa , bakato di nan bana.

2. *Manampuah jalan nan pasa*, maksudnya adalah aturan yang telah ada yang akan atau harus ditempuh menurut prosedur pelaksanaan dan tertib yang benar. Ada 2 jalan yang akan atau harus di tempuh yaitu jalan dunia dan jalan akhirat.⁹⁵
3. Mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak kemenakan).

⁹⁴ Alua adalah garis ketentuan aturan kebenaran yang harus dipedomani dalam berbuat dan bertingkah laku. Ada dua alua yang harus dipedomani dan diikuti 1. Alua adat, yaitu garis kebenaran dan aturan kebaikan yang dapat diterima hati nurani manusia setelah ditetapkan secara musyawarah, dengan kata lain yaitu aturan yang disukai bersama yang telah digariskan (ditetapkan) secara musyawarah mufakat oleh ahli akal budi (*lubuak aka lautaan budi*) demi kebaikan yang harus dipedomani dalam berbuat dan bertingkah laku. 2. Alua pusako, yaitu aturan kebenaran yang tidak dapat dibahas dengan musyawarah mufakat yakni aturan syarak dan aturan yang diterima dari nenek moyang kita yang telah membudaya dan mempunyai pesan-pesan moral dan etika yang sesuai dengan aturan agama. Aturan kebenaran yang telah harus demikian menurut yang menjadikan tinggal kita mengamalkan saja secara baik dan benar (aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah dan aturan wasiat dari nenek moyang kita) sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama (bermasyarakat) tidak dapat hidup sendiri karena satu sama lain saling butuh membutuhkan.

⁹⁵ Yang dimaksud jalan dunia yaitu aturan yang di buat manusia secara musyawarah mufakat yang harus ditempuh atau diterapkan secara baik dan benar (*adat tarantan nan di pakai, cupak tatagak nan diisi adat salingka nagari*) artinya adat yang kawi (dikuatkan) untuk diamalkan aturan dan hukum harus ditegakkan secara konsekwen yang adil. *Adat bajalan di nan tarang, hukum mahukum menurut adat bacupak bagantang, sangketo nan mandating hukum mananti, jalan pasa yang di turuik* (hukum resmi yang di pakai bukan hukum rimba). Jalan akhirat yaitu, aturan yang diterima dari Rasulullah Saw yang harus ditempuh menurut syarak yang lazim, ayat –ayat Allah yang terucap (al-Quran) dan yang tercipta (alau takambang jadi guru) serta sunnah Rasulullah sesuai dengan falsafah “Adat basandi syarak , syarak basandi Kitabullah (al-Quran)” Syarak mangato adat mamakai “atiullah wa atiurrasul wa ulilamri minkum” sebagaimana Allah memberikan penugasan khusus kepada manusia yaitu ia harus berfungsi sebagai khalifah di muka bumi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara anak kamanakan (kemenakan) adalah tugas penting bagi seorang penghulu atau niniak mamak dan datuk

4. Mamaliharo sako pusako .⁹⁶
5. Menerapkan peraturan atau adat salingka nagari, niniak mamak harus menguasai aturan dan undang-undang dalam mengatur masyarakat.
6. Penyelesaian masalah atau perkara sengketa. Tumbuah disilang jo salisiah hukum mahukum manuruik adat, niniak mamak harus menyelesaikan sebagaimana petuah adat sebagai berikut:

Kusuik yang kamanyalasai

Karuah nan kamampajaniah

Kusuik bulu paruah manyalsaikan

Kusuik banang cari ujuang pangkanyo

Kusuik abuak cari minyak jo sikek untuak disalsaikan

Kusuik sarang tampuo api yang kamanyudahi

Bajanjang naik batanggo turun

Salasai dibawah indak paralu kateh

Indak salasai dibawah baru naik kateh (bandiang)

Kasudahan adat kabalerong

Kasudahan dunia ka akhirat

⁹⁶ Sako adalah harta non benda berupa gelar pusako kebesarab kaum atau suku seperti gelar datuk dan lain-lain. Pusako adalah berupa harta benda yang merupakan unsur terpenting dalam kehidupan anak kemenakan dan merupakan ulayat kaum atau suku tempat usaha untuk hidup, “ harato jan tajua jo tagadai nak jan pupuih sako jo pusako, nak jan taniayo kaum sarato anak kemenakan dan keturunan. Sawah, ladang, harato pusako niniak mamak wajib untuk memelihara keutuhannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah kamanusia minta maaf

Salah ka Allah minta taubat

Indak ado kusuik yang indak salasai

Manjadi undang dek panghulu

Dago dagi mambari malu ,sumbang salah laku parangai.

Apo cupak dek panghulu batang kusuik tak salasai

Mangaruak sahabih gauang ,marosok sahabih rasao

Mamakai sudi jo siasek sarato sasi katarangan.

Dalam menyelesaikan masalah atau perkara niniak mamak telah dibekali ilmu dan dibimbing sebagaimana ditegaskan dalam syarak adat, mamak harus berdiri dijalan yang benar. Tidak berat sebelah dan harus bisa mencari solusi disetiap masalah anak kemenakannya.

7. Penasehat kebaikan atau pembangunan. Niniak mamak sebagai pemimpin anak kemenakan (masyarakat) yang membina dan menunjukkan kepada jalan kebaikan untuk berbuat dan bertingkah laku baik menurut adat dan agama.

8. Menyediakan waktu untuk kepentingan masyarakat. Niniak mamak Datuak panghulu adalah pemimpin dalam kaum atau suku yang tidak terlepas dari kebersamaan dalam berkorong berkampung dan banagari sesuai dengan ketentuan adat.

9. Musyawarah mufakat untuk kebaikan. Prinsip musyawarah mufakat

adalah pengangan tangguh niniak mamak.

g. Niniak Mamak mintra Pemerintah Nagari. Niniak mamak harus dapat menyediakan waktu dalam urusan *bakorong bakampuang*, *banagari* membina kerukunan dan musyawarah mufakat serta penegakan aturan hukum yang baik yang adil dan beradap.⁹⁷

Ada pepatah adat yang merupakan dasar pedoman bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yang menyatakan hubungan antara mamak dan kemenakannya, yang berbunyi sebagai berikut : “*anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung di patenggangkan.*” Artinya yaitu seorang mamak harus menimbang kemenakannya dengan asuhan pelajaran, sehingga dengan demikian bagi anak-anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar, pertama bapak dan kedua mamaknya, atau dengan pepatah adat dikatakan : *mamak karano data bapak karano darah.*

Dewasa ini perubahan sosial telah terjadi di lingkungan adat Minangkabau. Peran mamak mulai terasa berkurang, mamak lebih berfungsi sebagai bapak dalam keluarga istrinya. Posisi dan peran mamak pun mulai berubah dalam membimbing, kemenakan yang seharusnya adalah tanggung jawab mamak, tidak hanya mamak kemenakan pun sudah tidak sesuai lagi dengan pepatah sebagaimana yang diungkapkan oleh rangkuto “ sudah banyak yang terjadi dimana kemenakan menyanggah mamaknya baik ia kemenakan kandung ataupun kemenakan bertali budi. Banyak kemenakan yang tidak tau dengan mamaknya,

⁹⁷ Bustamam. Dt. Manidiah, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ada kemenakan perempuan yang mau menikah tidak memberitahu mamaknya lagi dan kemenakan perempuan yang sudah pandai mencari suami sendiri, dan ada pula kemenakan menghabiskan harta pusaka untuk kepentingan pribadinya. Menyimpulkan bahwa kebanyakan kemenakan sekarang tidak mau menurut lagi baik dengan adat maupun agama⁹⁸

4. Konsep Pergeseran

Pergeseran menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti peralihan, perpindahan dan pergantian.⁹⁹ Sedangkan menurut Gillin dan Gillin menyatakan perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima dan disebabkan karena perubahan geografis. Kebudayaan dan perubahan baru dalam masyarakat.¹⁰⁰ Perubahan itu bisa berupa kemajuan (progress) atau kemunduran (regres). Seperti yang dijelaskan oleh Astrit Susanto bahwa perubahan sosial akan mengalami kemajuan (progress) apabila masyarakat bisa menguasai teknologi dan menggunakan penemuan teknologi mengubah pendapat dan penilaian melalui falsafah hidup baru dan perubahan sosial akan mengalami kemunduran (regres) apabila manusia tenggelam pada persoalan-persoalan yang dihadapi dan mengambil sikap atau keputusan terhadap keadaan baru kedalam keadaan itu baru terjadi frustrasi.¹⁰¹

⁹⁸ Rangkuto N.M, *Lembaran Adat Minangkabau "Hubungan Mamak dan Kemenakan Dahulu dan Sekarang"*, (Bukittinggi: Lestari, 1878), hlm. 13-14.

⁹⁹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 13.

¹⁰⁰ Surjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 304-305.

¹⁰¹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah suatu proses modifikasi atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup antara dua kebudayaan dan kebudayaan yang baru yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat yang menembus batas keberbagai tingkat kehidupan sosial masyarakat di karenakan berbagai aspek kehidupan yang selalu berkembang dan terus berubah sesuai dengan perkembangan pengetahuan masyarakat dan teknologi penunjangnya.

B. Mamak Sebagai Hakam.

1. Pengertian hakam

Secara bahasa kata hakam asal maknanya **مَنْعَ مَنْعًا لِإِصْلَاحٍ** mencegah sesuatu perbuatan untuk islah (kemaslahatan).¹⁰² Hakam dapat disebut juga **الْقَضَاءُ** “ketentuan”.¹⁰³ Menurut istilah hakam diartikan: **“مَنْ يُخْتَارُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ”** orang yang dipilih atau ditunjuk untuk menyelesaikan dua orang yang berselisih paham”.¹⁰⁴

¹⁰² Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad terkenal dengan nama al-Rhagib al-Ashfahani, *al-Mufaddat fi Gharib al-Qur'an*, jilid ke-1, (tt: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, tth), hlm. 167; Hakam secara bahasa kata hakam berasal dari bahasa arab yaitu al-hakamu, juga mengandung arti yang sama dengan kata al-Faisal, Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 309; Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata hakam mengandung arti perantara, pemisah, wasit, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-3, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan balai pustaka, 2003), hlm. 383.

¹⁰³ *Al- Mu'jam al-wajiz*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1994), hlm. 165

¹⁰⁴ Sa'ad Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1419H/1998 M), hlm. 96 lihat juga, Muhammad 'Ali Shabuny, *Rawai' al- Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Cet Ke-3, (Beirut: Muassasah Manahil al-Irfani, 1400H/1980 M), hlm. 464.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan hakam, Ahmad Mustofa Al-Maraghi mendefinisikan hakam adalah orang yang mempunyai hak dalam memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.¹⁰⁵

Menurut Amir Syarifuddin hakam adalah seseorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Slamet Abidin dan Aminuddin mendefinisikan hakamatau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara kedua suami istri tersebut. Definisi ini hampir sama dengan definisi hakam yang diungkapkan M.A, Tihani dan Sohari Sahrani yang mendefinisikan hakam adalah juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damaiyang di kirim oleh dua pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa di ketahui siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.¹⁰⁶

Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi UU No.50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) memberikan pengertian hakam,dengan kalimat jelas bahwa hakam adalah orang yang di tetapkan pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain mencari upaya penyelesaian perselisihan syiqaq.¹⁰⁷

Hakam (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri yang tercantum dalam

¹⁰⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid V terjemahan K. Anshori Umar, (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 40.

¹⁰⁶ M. A Tihani, Sohari Sobani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 189.

¹⁰⁷ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

surat an- Nissa' ayat 35, menurut Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang sepadan dengan hakam.¹⁰⁸

Ada beberapa padanan yang mempunyai arti yang hampir sama atau mirip dengan hakam, seperti di kemukakan oleh M. Yahya Harahab memberi sinonim *arbitor* sebagai kata yang sepadan dengan hakam. Begitu juga Moeteza Mutahhari mengemukakan padanan hakam dengan kata “arbiter”.¹⁰⁹

Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa “arbitrase” dapat disepadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹¹⁰

Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang di kenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikannya disebut dengan “hakam”. Menurut Abu al Nain Fatah Muhammad¹¹¹ pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar,¹¹² pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan

¹⁰⁸ *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M. hlm. 265.

¹⁰⁹ M. Yahya Harahab, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama (undang-undang no 7 th 1989*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), hlm. 248.

¹¹⁰ Liwis Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah wa al-A'lam, Daar al- Masyriq*, (Beirut: tt), hlm. 146.

¹¹¹ Abu al Nain Fatah Muhammad, *al-Qadha wa al-Itsbat fi al- Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar Al Fikr, 1976), hlm. 84.

¹¹² Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, (Jakarta: 1994), hlm. 48-49.

atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan tahkim dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian diantara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.¹¹³

Beberapa pengertian hakam yang telah di jelaskan diatas dapat kita pahami, bahwa hakam adalah seseorang yang ditetapkan untuk mencari upaya penyelesaian atau sebagai penengah dari perselisihan antara suami dan istri, yang mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk mengadakan perbaikan tanpa di ketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah, baik itu dari pihak suami ataupun istri.

Penetapan dan pengangkatan hakam telah disebutkan dalam UU No. 50 tentang Peradilan Agama pada pasal 76 ayat (2). Bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan para saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih, dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.¹¹⁴

Al- Qur'an mengatur tentang proses penyelesaian sengketa baik melalui jalur pengadilan ataupun non pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan oleh hakam. Di dalam al-Qur'an sendiri konsep hakam dengan berbagai bentuknya di sebut dalam tujuh surat. Sedangkan yang menyebut hakam sendiri terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35, yang menjelaskan mengenai

¹¹³ Ibid.,

¹¹⁴ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyelesaian sengketa perselisihan dalam keluarga dengan mengangkat seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri.

Alquran surat al-Nisa' ayat 35, telah memerintahkan jika di khawatirkan ada persengketaan antara kedua (suami istri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Nisa' 4: 35).¹¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami dan istri, dengan mengirim seorang hakim “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Peran dan fungsi hakim dalam peradilan Islam adalah menjadi juru damai, yakni juru damai yang di kirim oleh dua pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.¹¹⁶

Ayat tersebut dikuatkan dengan surat al-Hujurat ayat 9-10 yaitu:

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009), hlm. 84.

¹¹⁶ Slamed Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 189.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁽⁹⁾ *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S al-Hujarat 49/9-10).*¹¹⁷

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana solusi apabila

terdapat perselisihan antara suami istri, yaitu dengan mengutus juru damai (hakam) baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Di mana ayat ini mensyariatkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri karena hendaknya hubungan mereka.¹¹⁸ Karena dalam pembicaraan rahasia kebaikan itu ada seperti mengadakan perdamaian di antara manusia,¹¹⁹ maka hendaklah datang golongan ketiga

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 516.

¹¹⁸ Ahmad Muthofa al-Maraghiy, *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm,255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi itu kalau sekiranya keduanya sama-sama mau kembali kepada yang benar niscaya mudahlah urusan.¹²⁰

2. Sejarah Hakam dalam Perkawinan

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam. Ulama syaf'iyah berpendapat bahwa wajib mengangkat hakam. Sedangkan ulama lainnya mengatakan sunnah, bahkan ulama lainnya sepakat boleh tentang menggunakan hakam sebagai penengah bila terjadi pertikaian suami istri yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35. Dan mereka para ulama sepakat bahwa hakam dari masing-masing pihak suami istri, kecuali tidak terdapat orang yang dijadikan hakam dari kedua pihak, maka boleh mendelegasi pada orang lain. Mereka jumhur ulama sepakat bahwa jika para hakam berbeda pendapat tidak terlaksananya pendapatnya, juga pendapat mereka dalam menggabungkan kedua suami istri terlaksana tanpa diwakili salah satu suami atau istri. Akan tetapi jumhur ulama berbeda pendapat jikalau keputusan hakam adalah untuk memisahkan keduanya, apakah atas izin dan persetujuan dari pihak suami isteri atau tidak? Maka dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan para sahabatnya boleh. Sedangkan as-Syafi'I, Abu Hanifah dan beberapa para sahabatnya bahwa mereka tidak berhak dalam memisahkan suami istri, kecuali disengaja oleh suami. Dasar hukum Malik adalah hadist dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan kepada hakam ada hak untuk menceraikan atau menggabungkan (ruju'). Dalam hal ini as-Syafi'I dan Abu Hanifah bahwa hukum asal (dasar) cerai/talak sang suami atau yang mewakilinya,

¹²⁰ Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir al-Azhar, jilid v*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005), hlm. 228.

bukan dari pihak lain. Bahkan sahabat Imam Malik berbeda dalam penjatuhan *talak* tiga oleh hakim, menurut Ibnu Qasim: Jatuhnya satu. Akan yang lain, mengatakan jumlahnya tiga.¹²¹

Jika dilihat dari orang Arab itu sendiri dari lembaga hakim atau arbiter atau penengah sudah ada sejak Nabi Muhammad belum diutus, sejak adanya manusia di dunia pada masa Nabi Adam as, pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil. Di mana Nabi Adam as yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hanya saja pada masa itu belum dikenal namanya hakim dan tugas-tugasnya.¹²² Bagi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah jika terdapat diantara mereka persengketaan atau perselisihan, mereka berpegang kepada tradisi atau kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku pada masing-masing kabilah suku¹²³. Lebih banyak menunjuk arbiter yang dipilih dari orang yang sudah dipercaya dapat menyelesaikan perkara mereka. Misalnya, seorang pendeta yang mempunyai supranatural kepada Tuhan.¹²⁴

Orang pertama yang menjadi hakim (hakam) dalam Islam adalah Rasulullah Saw. Seperti hal perjanjian yang di buat oleh Rasulullah antara kaum muslim dengan agama suku lain: "bahwa apa yang terjadi di antara mereka baik peristiwa atau perselisihan yang di khawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulullah Saw. Di jadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap perselisihan

¹²¹ Ibnu Ruys, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Cet ke-2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 73.

¹²² Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 10.

¹²³ *Ibid.*, hlm 29

¹²⁴ Noel J. Coulson, *A History of Isamic Law*, (Endinburg: Endinburg university press, 1991), hlm,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi diantara penduduk madinah, sehingga beliau menjadi satu satunya hakim mereka dalam setiap perselisihan dan perkara.¹²⁵

Contoh kasus penyelesaian yang dikeluarkan oleh Rasulullah Saw.

Khansa' binti Khaddam al-Anshariyah dinikahkan oleh bapaknya sedangkan ia janda dan tidak menyetujuinya, lalu ia datang kepada Rasulullah Saw. Maka beliau membatalkan pernikahan tersebut, lalu ia berkata kepada Rasulullah Saw : “saya tidak menolak sesuatu apa pun yang diperbuat oleh ayahku, tetapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka.

- b. Seorang wanita di talak suaminya, dan suaminya ingin mengambil anaknya darinya, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad Saw., maka beliau berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak dengannya selama engkau tidak menikah”.¹²⁶

Hakam hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.¹²⁷ Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki- laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.¹²⁸ Sedangkan syarat-syarat menjadi hakam menurut jumhur ulama adalah

¹²⁵ Alaidin Koto (et.al), *Op. Cit.*, hlm. 38-39.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 49-50.

¹²⁷ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

¹²⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 159.

orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan.

Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua. Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakim) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakim dalam kasus syiqaq (perselisihan, percekcoakan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama).¹²⁹

Sebab tujuan pokok dibutuhkanya hakim adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakim harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dari bidang mediasi.¹³⁰

Berdasarkan pengertian zahir nash surat al-Nisa' ayat 35, para ulama fiqih mengatakan bahwa juru damai (hakim) adalah wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri. Menurut Wahbah al-Zuhaili guru besar fiqih dan ushul fiqih Universitas Damaskus. Syarat-syarat hakim adalah (1) laki-laki, (2) Adil, (3) mengetahui (cukup informasi mengenai permasalahan yang didamaikan). Sedangkan menurut sayyid sabiq syarat-syarat menjadi hakim diantaranya: (1) berakal, (2) baliqh, (3) adil, (4) Muslim.¹³¹

Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakim yaitu :

- a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas

¹²⁹ Ibid.,

¹³⁰ Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999), hlm. 1708.

¹³¹ Ensiklopedi Islam, *Op. Cit*, hlm. 1709.

- c. Disegani oleh kedua pihak suami dan istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.¹³²

Win-win solution dapat merupakan salah satu bentuk dari qist (adil), Allah senang ditegakkannya keadilan walaupun itu mengakibatkan kerenggangan antara dua pihak yang berselisih, tetapi dia lebih senang jika kebenaran dapat dicapai sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang tadinya berselisih.¹³³ Dalam ajaran Islam menuntut adanya *Islah*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.¹³⁴ Islam mengajarkan *Islah* dalam upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu hingga manfaatnya lebih banyak lagi,¹³⁵ dalam hadist nabi juga dijelaskan tentang perdamaian yaitu:

عَنْ عُمَرِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: > الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا < رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَانْكَرُو عَلَيْهِ لِأَنَّ رَأْيَهُ كَثِيرُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ . وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طَرُقِهِ

Artinya :

”Dari Amar Abnu Auf al-Muzany Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian

¹³² H.M.A. Tihami, Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 193.

¹³³ M. Qoraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an*, Cet ke-4, (Jakarta: Tentera Hati, 2002), hlm. 245.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Aut adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya).¹³⁶

Hadits di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dasar disyariatkannya perdamaian adalah selama perdamaian itu bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini yang tidak dibolehkan untuk kaum muslim. Dengan adanya perdamaian akan terhindarlah kehancuran, silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Seorang hakim dipercaya sebagai pihak tengah yang netral, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga antara keduanya tidak terjadi peperangan dalam waktu yang lain,¹³⁷ karena perdamaian itu wajib antara dua kelompok sebagaimana wajib pula antara dua orang bersaudara.¹³⁸ Maka masalah tersebut sebisa mungkin di selesaikan secara kekeluargaan, penyelesaian lewat mahkamah itu hanya diperlukan ketika sudah tidak ada jalan *ishlah* dari pihak suami.¹³⁹ Dan dua hakim itu harus benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan antara suami istri. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat al-Nisa' ayat 114:

¹³⁶ Muh. Syarief Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: PT. Alma'arif, 1961), hlm. 321

¹³⁷ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 26, h. 221

¹³⁸ *Ibid*, h. 219

¹³⁹ Ash Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Ahabuni*, jilid 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm.414

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S al-Nisa' (4):114)¹⁴⁰

Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kebolehan seseorang menjadi hakim, akan tetapi terdapat kalimat yang menegaskan bahwa orang yang menyuruh (manusia) mengadakan perdamaian diantara manusia karena mencari keridhoan Allah maka kelak akan diberi pahala yang besar. Apabila dikaitkan dengan posisi hakim maka tujuan pengangkatan seorang hakim bersesuaian dengan ketentuan ayat tersebut, karena keberadaan hakim untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengadakan perdamaian diantara para pihak, oleh sebab itu ayat tersebut dapat menjadi landasan diangkatnya seorang hakim karena dalam perkembangan manusia dan seiring perubahan zaman tentunya banyak terjadi perubahan bahkan terdapat permasalahan-permasalahan baru yang tidak mempunyai hukum. Tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka manusia berhak penuh mengaturnya, termasuk ke dalam kategori yang tidak diatur oleh hukum Islam.¹⁴¹

3. Tugas dan Fungsi Hakim

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹⁴¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 278.

Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, tugas hakim adalah sebagaimana tugas hakim, dalam sifat hakim harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Hakim merupakan bagian kecil dari tugas manusia secara universal. Ia sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim.¹⁴² Tugas hakim harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam Alquran, sebagai berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَادْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shad (38):26)¹⁴³

Dalam ayat ini, Allah SWT, memerintahkan kepada orang yang di tunjuk menjadi khalifah (penguasa) di muka bumi ini, untuk berlaku adil tatkala menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum dan mengadili tidak berdasarkan membuat manusia berpaling dari kebenaran dan hakikat. Dalam masalah menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum, ayat di atas menggunakan kata

¹⁴² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 36.

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 454.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak bahwa hukum dan peradilan harus berdasarkan kebenaran dan fakta yang ada sehingga tiada satu pun yang dizalimi dari dua pihak yang bersengketa. Dan di larang memutuskan suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Nisa' (4):65 sebagai berikut:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. al-Nisa' (4):65)¹⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya sebelum Allah SWT, mengutus seorang hakim diantara mereka yang dianggap mampu mendamaikan diantara dua pihak yang sedang berselisih, masih banyak manusia yang tidak beriman dan tidak mau tunduk kepada kebenaran.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5): 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan

¹⁴⁴ Ibid, hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.(Q.S. al-Maidah (5): 49)¹⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan di larang dalam ayat tersebut dalam memutuskan suatu perkara didasari dengan hawa nafsu yang dapat merugikan dari pihak yang sedang berselisih, karna itu harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara agar tidak merugikan orang lain.

Fungsi hakim adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang hakim dalam membela, medampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap Negara untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Tugas hakim bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation bereop*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi hakim tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (*profit oriented*) tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat.¹⁴⁶

Ibnu Qudamah secara Kronologis menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh seorang hakim dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu:

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁴⁶ Supriadi, *Op. Cit*, hlm. 162

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya konflik tersebut, dan apabila ditemukan penyebabnya adalah nusyuznya isteri maka penyelesaiannya adalah sebagaimana kasus nusyuz isteri, dan apabila penyebab permasalahannya adalah karena nusyuznya suami maka yang harus dilakukan adalah mencari orang yang disegani untuk menasehati sang suami supaya menghentikan sikap nusyuznya terhadap isteri. Dan apabila konflik tersebut berasal dari keduanya dan keduanya saling menyalahkan maka hakim mencari orang yang disegani untuk menasehati keduanya.

Kedua, bila langkah-langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan pihak isteri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua orang yang ditunjuk oleh hakim tersebut diserahkan wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka diperbolehkan untuk menceraikannya.¹⁴⁷

C. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian saya. Namun peneliti mengangkat judul penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta

¹⁴⁷ <http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.co.id/2012/03/syiqaq-pengertian-dan-akibat-hukumnya.html>. (diakses pada tanggal, 20 Agustus 2019)

menentukan orisinalitas pokok pembahasan peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ajukan.

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nofiardi, Fakultas syariah IAIN Bukittinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi, dengan judul Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultur dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Dalam jurnalnya ini dibahas mengenai perkawinan dan baganyi. Perkawinan menurut adat Minang merupakan masalah bersama, hal ini terlihat ketika mencari jodoh dan perjanjian pertama, peminangan dan sampai pelaksanaan pesta. Setelah menikah suami dijemput secara adat untuk tinggal dirumah istrinya meskipun ia bukan orang Minang. Konsekuensi seperti ini suami ibarat seperti abu di atas tunggul yang bisa terbang ketika angin kencang datang. Ketika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang sulit dicarikan jalan keluar dengan istrinya, maka kemungkinan meninggalkan istrinya yang disebut dengan baganyi, bila tidak di selesaikan akan berujung kepada perceraian. Tidak jelasnya dengan status istri (digantung indak batali), kurangnya perhatian terhadap anak, nikah sirri dan isbat nikah merupakan dampak dari baganyi, disini khususnya niniak mamak ikut membantu mencari solusi, tidak hanya dalam perkawinan saja urusan bersama. Suami baganyi yang bisa berujung perceraian merupakan urusan bersama sehingga perceraian tidak terjadi, di sini peran mamak sangat di butuhkan. Pergeseran terjadi banyak pasangan yang bermasalah tidak memberitahun kepada mamaknya. Padahal kalau diberitahu mamak pasti akan menyelesaikan masalahnya, walaupun mamak sudah mengetahui masalah dalam keluarga anak kemenakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan tidak memberitahu mamak secara resmi biasanya mamak tidak mau ikut campur. Akan tetapi dalam masalah harta warisan mamak sering dilibatkan oleh kemenakanya dalam penyelesaiannya¹⁴⁸

2. Jurnal penelitian Irfan yang berjudul Fungsi Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa: Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, dan tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ketika perkawinan (rumah tangga) timbul suatu konflik atau pertengkaran yang dapat membahayakan keutuhan sebuah keluarga (*syiqaq*), maka angkatlah penengah diantara mereka atau *hakam* guna mendamaikannya. Pegangkatan *hakam*, ialah mengutus juru damai yang disebut *hakam* dari pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki untuk mendamaikan persengketaan atau perselisihan suami istri itu. *Hakam* semaksimal mungkin berusaha untuk mendamaikan suami istri itu, apabila tidak berhasil maka *hakam* boleh membuat suatu kesimpulan bahwa kedua belah pihak sulit untuk didamaikan. Fungsi *hakam* dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (*syiqaq*) dalam Peradilan Agama, hanya dengan alasan *syiqaq* maka *hakam* itu ada dan diangkat. Karena *syiqaq* ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri. *Syiqaq* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Fungsi *hakam* selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas

¹⁴⁸ Nofiardi, *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, (Jurnal Fakultas syariah IAIN Bukittinggi, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim, *hakam* tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan.¹⁴⁹

3. Jurnal penelitian Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, M.Si yang berjudul “Pergeseran Peran Ninik Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi (Studi kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pergeseran peran ninik mamak di masyarakat Nagari Kamang Hilia sebelum era modernisasi yaitu dalam memelihara anak kemenakan, dalam perkawinan, dalam permasalahan sengketa, dan memelihara harta pusaka. Dan pergeseran peran ninik mamak yang terjadi ketika era modernisasi yaitu memelihara anak kemenakan dalam segi keseharian, dalam perkawinan dari segi mencari jodoh, dan memelihara harta pusaka. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran ninik mamak di masyarakat Nagari Kamang Hilia yang terdiri dari menguatnya peran keluarga inti, adanya budaya merantau, ekonomi, dan pendidikan.¹⁵⁰
4. Jurnal penelitian Ninawati Syahrul yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Ditinjau Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat pada jalinan kekerabatan dalam garis keturunan ibu. Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau membuat *mamak* memiliki

¹⁴⁹ Irfan, *Fungsi Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, (Jurnal Edutech, 2018).

¹⁵⁰ Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, *Pergeseran Peran Ninik Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi (Studi kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)*, (Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kemenakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realitas pandangan Abdoel Moeis dalam novel *Salah Asuhan* tentang peran *mamak* dalam tata pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami persoalan nilai budaya tradisional yang berlangsung secara turun-temurun, bahkan hingga pada masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi pengarang menyukai pengorbanan *mamak* sebagai suatu realisasi dari tanggung jawabnya terhadap kemenakannya, seperti pengorbanan Sutan Batuah dalam membantu biaya sekolah Hanafi. Pada sisi lain, melalui tokoh Hanafi, tokoh *mamak* hanya penyebab ketidakbebasan generasi muda untuk menentukan jodoh atau pasangan hidupnya. Novel *Salah Asuhan* sarat akan nilai-nilai kehidupan seputar sistem kekerabatan. Peran dan tanggung jawab *ninik mamak* dan orang tua terkesan tergugat dari sudut pandang kehidupan modern sekarang ini. Melalui novel ini dikatakan bahwa pemaknaan adat-istiadat Minangkabau yang meliputi wujud kebudayaan, kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan berperan sebagai pengendali perilaku warga masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan atau pernikahan yang diadatkan.¹⁵¹

Keempat penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul: Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik menurut perspektif Hukum Islam Analisis Terhadap pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakim dalam Hukum Keluarga, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh keempat peneliti di atas. Penelitian ini memfokuskan pada Kedudukan Mamak dalam

¹⁵¹ Ninawati, *Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Ditinjau Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis*, (Jurnal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta Timur, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik sebagai hakam dari sudut pandang Kerapatan Adat Nagari, Kepala Wali Nagari dan masyarakat setempat yang nantinya menggunakan paradigma fenomenologis dan kualitatif.

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Nagari Kamang Mudik merupakan salah satu Nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Kamang Magek, yang dikepalai oleh Wali Nagari, Nagari Kamang Mudik terdiri dari 8 jorong yaitu Jorong Pauh, Jorong Durian, Jorong Aia Tabik, Jorong Pakan Sinayan, Jorong Bansa, Jorong Babukik, Jorong Halalang dan Jorong Padang Kunyik. Masing-masing Jorong dikepalai oleh seorang Kepala Jorong, setelah pemerintah pusat menyerahkan kewenangan terhadap pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing demi pembangunan daerah sendiri dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.¹⁵² Secara otomatis nama desa diganti dengan Nagari yang dikepalai oleh seorang Wali Nagari.

Secara umum dapat digambarkan bahwa Nagari Kamang Mudik merupakan suatu Nagari yang terletak di Kecamatan Kamang magek. Masyarakatnya adalah masyarakat yang mempunyai budi pekerti yang mulia, baik dan dinamis, ha ini terbukti dengan rendahnya tingkat masalah sosial kemasyarakatan yang muncul.

Dilihat dari letak geografis Nagari Kamang Mudik berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Rantang

¹⁵² Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1994 berisikan tentang Hak Otonomi Daerah, kewenangan pemerintahan daerah seutuhnya diserahkan kepada pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 pemerintah Sumatera barat mengoptimalkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan menggalakkan “*baliak ka Nagari*”

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kamang Hilir
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pasir Laweh
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Koto Tengah

Nagari Kamang Mudik mempunyai luas 6264 Ha, yang terdiri dari 8 jorong yaitu Jorong Pauh, Jorong Durian, Jorong Aia Tabik, Jorong Pakan Sinayan, Jorong Bansa, Jorong Babukik, Jorong Hilalang, dan Jorong Padang Kunyik. Penduduk Kamang Mudik secara keseluruhan berjumlah 10.401 berdasarkan hasil sensus pada tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk

o	Jorong	Lk	Pr	Jumlah
	Pauh	1,16 8	1,28 6	2,454
	Durian	645	797	1,442
	Aia Tabik	451	484	935
	Pakan Sinayan	1,07 2	1,23 5	2,307
	Bansa	235	306	541
	Babukik	593	605	1,198
	Hilalang	438	311	749
	Padang Kunyik	382	393	775
	Jumlah			10401

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber Data: Kantor Wali Nagari 2019

b. Penduduk dan Perekonomian

Masyarakat Nagari Kamang Mudik mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya adalah bertani, berdagang, buruh, pegawai, dan Tukang. Mata pencarian mayoritas penduduk Nagari Kamang Mudik adalah petani, hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang terdapat di Kenagarian Kamang Mudik. Hasil tani mereka berupa padi, dan juga hasil ladang seperti cabe, sayur mayur. Berikut ini dijelaskan perekonomian masyarakat Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek:

Tabel IV.2
Ekonomi

o	Tingkat Perekonomian	Jumlah
	Petani	90%
	Pedagang	3%
	Pegawai	2%
	Buruh	3%
	Tukang	2%
	Jumlah	100%

Sumber Data: Kantor Wali Nagari 2019

Berdasarkan table di atas dapat dipahami bahwa sektor pertanian merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat Kamang Mudik dengan presentase 90% kemudian pedagang 3%, pegawai 2% dan buruh 3% tukang 2%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Agama dan Adat

Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang jumlah penduduk Kenagarian Kamang Mudik yang berjumlah 100% beragama Islam. Kehidupan sosial budaya di Kenagarian Kamang Mudik bergotong royong sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya kerjasama antara masyarakat di daerah seperti gotong royong, membuat pengairan sawah dan lain-lain.

Demikian juga dengan kehidupan keberagamaan di Kenagarian Kamang Mudik berjalan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan shalat berjamaah di setiap masjid dan mushalla. Adanya tarekat atau *suluk*, peringatan hari-hari besar umat Islam seperti isra' mi'raj, mauled Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Pelaksanaan MTQ yang biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan atau bulan Syawal. Disamping itu dalam menjalankan ajaran Islam mereka didukung oleh sarana ibadah yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel IV.3
Agama

Jenis	Jumlah
Masjid	10
Mushalla	32
Jumlah	42 buah

Sumber Data: Kantor Wali Nagari 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana ibadah yang terdapat di Kenagarian Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek meliputi

masjid sebanyak 10 buah dan mushalla sebanyak 32 buah dengan jumlah keseluruhan adalah 42 buah sarana untuk ibadah.

Nagari Kamang Mudik memiliki 7 (tujuh) suku, yaitu Jambak, payobada, piliang, Sikumbang, melayu, Koto dan Budi. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang datuak (datuak) suku yang kemudian bersatu dalam wadah kerapatan adat Nagari (KAN).¹⁵³ Dalam KAN inilah para *penghulu* menyelesaikan persoalan adat yang terjadi di tengah masyarakat Nagari, serta menetapkan berbagai aturan adat yang diambil berdasarkan musyawarah dengan melibatkan alim ulama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat.

d. Pendidikan di Kenagarian Kamang Mudik

Tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan. Semakin banyak warga atau masyarakat yang sadar akan pentingnya tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Untuk menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya dan sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia di usia sekolah di Nagari Kamang Mudik, pemerintahan membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Ditinjau dari segi pendidikan, di Kenagarian Kamang Mudik jumlah yang tidak sekolah masih ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perekonomian masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan juga karena kurangnya minat anak

¹⁵³ KAN yang merupakan lembaga adat tertinggi di Nagari Kamang Mudik yang dikepalai oleh seseorang datuk persukuan yang dipilih melalui mufakat oleh datuk-datuk dari perwakilan suku yang menyelesaikan masalah persoalan adat *nagari*.

tersebut mengikuti pelajaran. Berikut ini dijelaskan tingkat pendidikan di Kenagarian Kamang Mudik.

Tabel IV.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD	970
SD	560
SLTP	580
SLTA	630
PT (D1-D3)	97
S1	120
S2	15
S3	6
Jumlah	2978

Sumber Data: Kantor Wali Nagari 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan yang terdapat di Kamang Mudik terdiri dari tidak tamat SD berjumlah 970 orang, SD berjumlah 560 orang, SLTP berjumlah 580 orang, SLTA berjumlah 630 orang, perguruan tinggi D1-D3 berjumlahnya 97 orang, S1 berjumlah 120 orang, S2 berjumlah 15 orang, dan S3 berjumlah 6 orang, dengan jumlah keseluruhan 2978 orang.

Jika membicarakan pendidikan tidak terlepas dari fasilitas yang dapat

menunjang pendidikan itu sendiri, berikut ini akan penulis kemukakan fasilitas pendidikan yang ada di Kamang Mudik sebagai berikut.

Tabel IV.6

Sarana atau Fasilitas Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
TK	5 buah
SD	12 buah
SLTP atau MTs	4 buah
SLTA atau MAN	3 buah
Jumlah	24 buah

Sumber Data: Kantor Wali Nagari 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sarana atau fasilitas pendidikan yang terdapat di Kamang Mudik berjumlah 24 buah, meliputi gedung TK sebanyak 5 buah, SD sebanyak 12 buah, SLTP atau MTs sebanyak 4 buah, dan SLTA atau MAN sebanyak 3 buah.

Berdasarkan data yang penulis sampaikan di atas, tingkat pendidikan masyarakat Kamang Mudik sudah memadai, hal ini terbukti dengan sudah banyak anak mereka yang tamat sekolah 9 tahun bahkan ada yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, hal ini didorong beberapa hal diantaranya:

Semakin baiknya perekonomian masyarakat, baiknya tingkat pendidikan, tentu mereka mampu menyerahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, memberi kesadaran dan motivasi warga masyarakat untuk mendidik anaknya ke berbagai lembaga pendidikan, Masyarakat akan maju.

Mulai berkurangnya pandangan masyarakat bahwa pendidikan tidak perlu bagi perempuan yang pada akhirnya ke dapur juga.

Dengan adanya faktor di atas, bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dapat melanjutkan ke luar Nagari Kamang Mudik seperti Bukittinggi, padang panjang, padang dan bahkan keluar wilayah Sumatera barat dan tidak tertutup kemungkinan untuk ke luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis empiris.¹⁵⁴ Pendekatan yuridis yaitu hukum hanya Law in book, yakni dalam mengadakan pendekatan prinsip-prinsip dan peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus di buktikan secara nyata di dalam masyarakat. Data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, perilaku-perilaku, serta situasi dan kondisi yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini meneliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dalam perhitungan angka-angka, dengan alasan lebih mudah jika berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penerjemahan pengaruh bersama terhadap pola-pola yang di hadapi.¹⁵⁵

Jenis penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis hukum adat di Miringkabau mengenai kedudukan mamak dalam masyarakat adat Nagari Kamang

¹⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1955), hlm.55

¹⁵⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posda karya, 2015), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga. Kemudian dibahas atau dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat, Nagari Kamang Mudik merupakan salah satu Nagari yang mempunyai 8 (delapan) Jorong. Penentuan objek ini berdasarkan tempat yang penulis pahami dan memudahkan penulis karena lokasi tersebut menyimpan bahan hukum yang diperlukan dan berkaitan dengan kedudukan mamak dalam masyarakat adat nagari kamang mudik menurut perspektif hukum Islam analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga dan tempatnya sangat strategis untuk melakukan penelitian karena adat sangat berperan pada lingkungan tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan rentang waktu untuk melakukan penelitian, penelitian ini di mulai tanggal 04 Januari 2019 sampai semua data terkumpul atau penelitian ini dirasa telah selesai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya dapat diduga atau sebagai keseluruhan individu yang menjadi subyek penelitian yang nantinya akan dikenal general generalisasinya.¹⁵⁶

¹⁵⁶ IB, Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, (Surabaya, 1976), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat dari beberapa suku yang ada di Nagari Kamang Mudik .

2. Sampel

Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu, dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar yaitu seperti dikemukakan oleh mardalis yaitu Penggunaan tehknik purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja. Cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili secara karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehknik ini senantiasa kepada ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.¹⁵⁷

Adapun yang menjadi sampel adalah Mamak Kepala Kaum dan Kaumnya di Nagari Kamang Mudik.

D. Data dan Sumber data

Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.¹⁵⁸ Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵⁹ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung mengamati dan mencatat Fenomena melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan

¹⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

¹⁵⁸ Rianto Adi, *Metode Peneltian Sosial dan Hukum*, Cet ke-2, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

¹⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998), hlm. 91.

dokumentasi sehingga didapat data berupa rekaman suara/ gambar, catatan, dokumen, literature kitab tentang hakam, buku tentang Hukum adat Minangkabau dan gambar/foto sebagai data primer karena data-data tersebut sangat sesuai dengan penelitian ini dan sangat tepat untuk menjawab fokus penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Informan terdiri dari: Wali Nagari, Ketua Kerapatan adat Nagari, penasehat kerapatan adat Nagari, Alim ulama dan Datuak (Niniak mamak) dan masyarakat (informan biasa) yang mengetahui tentang Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik sebagai Hakam

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Subjek penelitian

No	Nama	Umur	Suku	Jabatan	Alamat
1.	Ahmad Latif Dt Samiak, S.sos	39 th	Sikumbang	Ketua Wali Nagari	Durian Kamang Mudik
2.	Purwadi Dt Rajo Imbang	49 th	Budi	Penasehat Kerapatan Adat Nagari	Pakan Sinayan, nagari Kamang Mudiak
3.	Warmanizar	60 th	Sipanjang	Masyarakat	Sungai dareh, Nagari Kamang Mudiak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Slamet Hidayat	30 th	Jambak	Anggota Buek Arek 7 suku pauh	Pauh, Nagari Kamang Mudiak
5.	Donri Dt Sati	52 th	Sikumbang	Anggota KAN nagari Kamang Mudiak	Kp. Barangai, Nagari Kamang Mudiak
6.	Nasrun nyk yang basa	62 th	Koto	Alim Ulama	Tabiang, Nagari Kamang Mudiak

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau tangan kesekian.¹⁶⁰ Data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan sumber dokumen historis yang murni. Maka dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti lebih lanjut melalui literature atau bibliografi.

Alasan peneliti menggunakan literature atau bibliografi sebagai data sekunder karena data-data tersebut dapat memperkuat data-data primer. Sebagai

¹⁶⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian...*, 165.

perbandingan untuk data-data primer, dan melengkapi data-data primer sehingga menjadi data-data yang utuh ketika di sajikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan field research (penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial, dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi meliputi perhatian terhadap suatu objek melalui penglihatan, pendengaran, rekaman gambar maupun rekaman suara.¹⁶¹ Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti adalah sebagai pengamat, artinya bahwa peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya, sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi tersebut dalam kewajarannya.¹⁶²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan Mamak sebagai hakim dalam menangani masalah hukum keluarga yang terjadi di Nagari Kamang Mudik, serta mengamati kondisi masyarakat mengenai adat dan mengamati budaya setempat.

2. Interview (wawancara)

¹⁶¹ Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Penelitian Tindakan kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 128.

¹⁶² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model interview bebas terpimpin, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetap mengingat akan data yang akan di kumpulkan dengan membawa sederetan pertanyaan.¹⁶³ Yang merupakan suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview dapat dikatakan pula sebagai bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁶⁴ Maka, dengan interview tersebut dapat memperoleh jawaban dan keterangan dari responden sesuai dengan tujuan peneliti.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang menggunakan bahan tertulis. Didalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang hal ini berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil pengertian metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun tulisan.
- b. Dokumen interview atas pembeding dari ketua adat dengan perangkat Nagari

¹⁶³ Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Op. Cit.*, hlm 128

¹⁶⁴ S. Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 113.

F. Metode Pengelolaan Data

Proses pengelolaan data merupakan proses yang perlu di tempuh untuk menyajikan data. Dalam teknik pengelolaan data yang sudah di sebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap Edit

Tahap edit merupakan tahap yang dimaksud untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data –data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Sebelum data diolah, data pengelolaan perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pernyataan atau *interview guide* perlu di baca sekali lagi dan di perbaiki jika disana masih terdapat hal-hal yang salah atau meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data yang dinamakan mengedit data.¹⁶⁵

Seluruh data yang berkaitan dengan Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Analisa terhadap Kewenangan Paman sebagai Hakam dalam Hukum Keluarga, dapat diambil makna sendiri sebagai kebenaran empirik yang bersifat logik atau teoritik untuk di beri pemaknaan secara intelektual dan diberi argumentasi

¹⁶⁵Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 111.

secara logic. Penekanan pada makna dari hasil penelitian ini dapat menjadi indikator keabsahan dan prediksi data yang akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Tahap Klarifikasi/Coding Data

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu yang mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan peneliti.¹⁶⁶

Reduksi merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Tahap Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.¹⁶⁷ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subjek dan memberikan sumber wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, sebagian data penulis memverifikasi dengan cara triangulasi yaitu mencocokkan (cross check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapatan subyek yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan proposionalnya.

G. Teknik Analisa Data

¹⁶⁶Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2015), hlm. 290.

¹⁶⁷ Maria, S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 38.

Metode Deduktif yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum.

Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merupakan proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis dilapangan. Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

b. Displat Data

Displat data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara berbagai table dan keseluruhan data yang diperoleh sehingga lebih mudah untuk melakukan analisis.

c. Penyajian Data

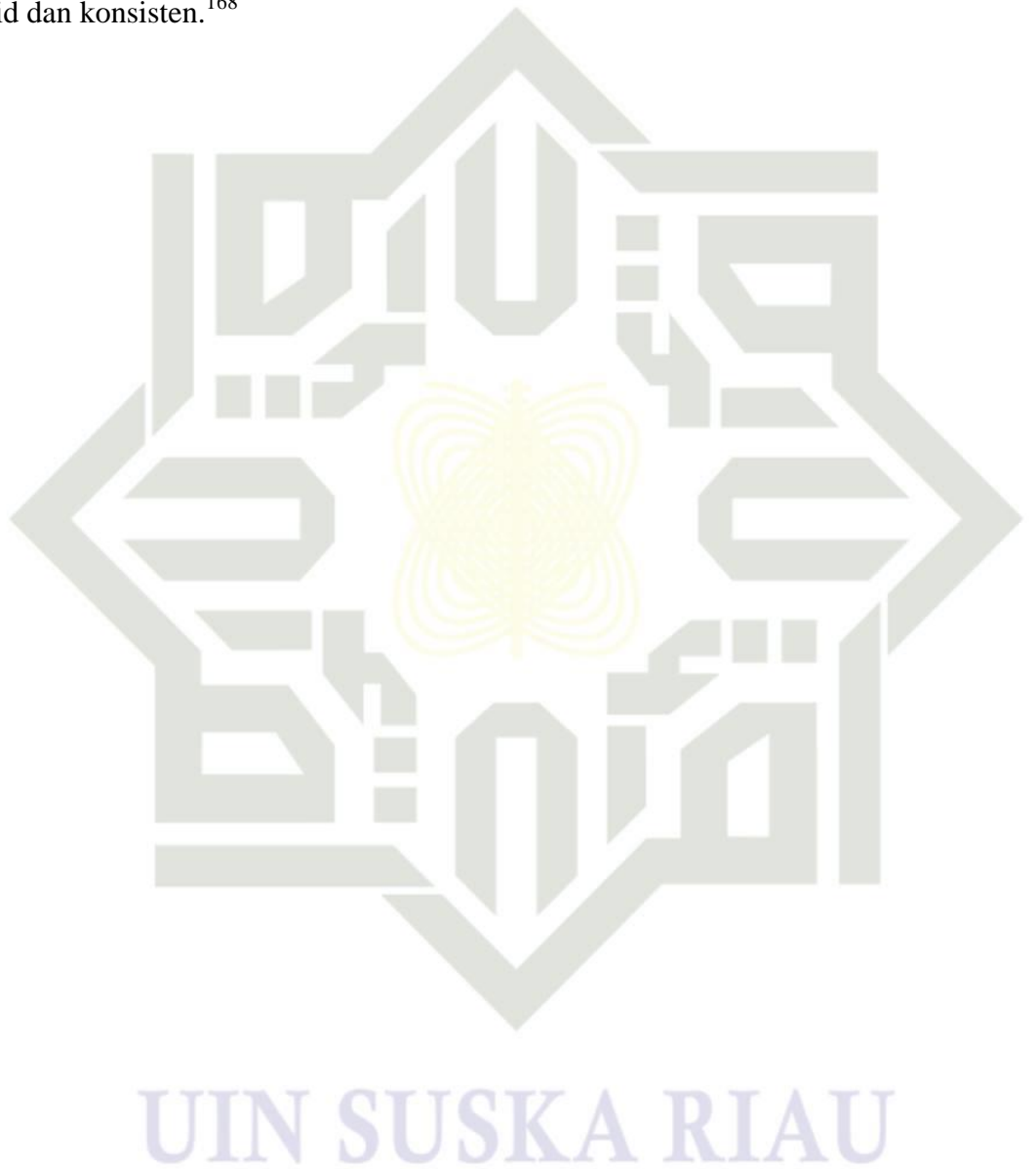
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.

d. Penarikan kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.¹⁶⁸



¹⁶⁸ Imam Suprayogo, Tabrani, *Metode Penelitian Agama*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2001), hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tesis ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Upaya mendamaikan dalam penyelesaian perselisihan atau persengketaan yang dilakukan oleh mamak sebagai hakam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penyelesaian masalah atau perkara yang diselesaikan mamak adalah masalah yang berhubungan dengan orang banyak. Masalah perkawinan, cerai, talak, rujuk yang berwenang dalam menyelesaikannya adalah walinya (Ayah), jika ayah tidak bisa menyelesaikan baru bisa mamak untuk mengambil alih peran ayah. Mamak tidak bisa menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan permasalahan nafkah lahir bathin suami istri yang tidak terpenuhi, mamak hanya menyelesaikan perkara sosial antar kelompok keluarga. Penyelesaian perkara di Nagari Kamang Mudik dilakukan mulai dari tingkat bawah, karena adat menerapkan lembaga kepemimpinan yang berjenjang begitu juga dalam penyelesaian masalah atau perkara dalam menyelesaikan masalah keluarga. Dalam istilah adat dinamakan *bajanjang naik batanggo turun, Salasai di bawah indak paralu kateh, indak salasai dibawah naik kateh* yang diselesaikan oleh mamak. Perkara diselesaikan berjalan dengan baik dan efektif, karena sebagian besar perkara terjadi disebabkan oleh permasalahan dari anak kemenakan mamak itu sendiri di dalam keluarga atau masyarakat, terbukti beberapa orang yang didamaikan dapat diselesaikan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

damai. Hanya sebagian kecil perkara yang sampai ke pengadilan Agama. Pembagian harta warisan pencaharian bersama suami istri di Nagari Kamang Mudik yang berwenang untuk menyelesaikan tetap pengadilan sedangkan masalah warisan harta pusaka tetap mamak yang menyelesaikan perkara.

Kedudukan mamak di Nagari Kamang Mudik terjadi pergeseran antara lain karena faktor pendidikan, ekonomi, memudarnya tali silaturahmi, dan menguatnya peran keluarga inti. Tetapi pada dasarnya kedudukann mamak sangat diperlukan untuk memimpin, memelihara anak kemenakannya, karena adat Minangkabau sendiri adalah Produk budaya berdasarkan Agama Islam (Agama samawi) dan unsur kepemimpinan di Nagari Kamang Mudik di kenal dengan *tungku Tigo Sajarangan* (Ninik mamak, Alim Ulama, cerdik Pandai). Mamak sebagai pemimpin dalam masyarakat dan anak kemenakannya harus mampu menegakkan harkat martabatnya, hingga didengar dan diikuti dengan senang hati oleh anak kemenakan. Dalam menjalankan adat istiadat di Nagari Kamang Mudik *Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah*, tidak akan pernah berbenturan antara syarak dengan adat. Adat mengatur hubungan antar kelompok orang bukan hubungan perorangan.

B. Saran

Dari pembahasan tesis ini dapat dipahami secara jelas bahwa peran mamak sebagai hakan dalam upaya penyelesaian masalah atau perkara yang berhubungan dengan keluarga dilakukan melalui komunikasi langsung dengan upaya jalan damai, salah satu alternatif yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Kamang Mudik. Perubahan-perubahan yang terjadi didalam

masyarakat sebab bagian dari perubahan global, tidak membawa dampak pengikisan pada nilai-nilai adat yang telah tumbuh sejak zaman dahulu. Untuk para pemikir Islam diharapkan untuk dapat meneliti kembali pentingnya peran Mamak sebagai hakam dalam permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga serta merumuskan dengan jelas tentang bagaimana tata cara upaya damai yang di benarkan menurut hukum Islam, agar masyarakat tidak kekurangan rujukan ketika menemui permasalahan dalam keluarga atau masyarakat yang membutuhkan jalan damai.

Untuk pemerintah Nagari diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan mamak dalam menegakkan aturan adat di Nagari, untuk dapat mendorong mamak sebagai juru damai (hakam) menjalankan fungsinya dengan baik. Bagi masyarakat terutama untuk masyarakat Nagari Kamang Mudik diharapkan ketika mencari solusi untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan jalan damai dengan menghadirkan hakam sebagai juru damai, untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum Islam. Agar dalam mencari jalan damai tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya dan tercapainya tujuan yang sesungguhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al Nain Fatah Muhammad, *al-Qadha wa al-Itsbat fi al- Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar Al Fikr, 1976)

Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad terkenal dengan nama al-Rhagib al-ashtahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (tt: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, tth), jilid ke-1

Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, jilid v, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005)

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group. 1994)

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

Ahmad Mustofa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, (Semarang, Toha Putra, 1998), jilid 1

Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaidh Fiqhiyyah*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2008)

AA Navis, *Alam Takambang jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti, 1984),

Al- Mu'jam al-wajiz, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alaiddin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet-Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010)
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cet ke-1, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Bustamam. Dt. Manidiah, *Pembinaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, Baso: LKAAM Kabupaten Agam
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998)
- B. er Haar Bzn , penerjemah Soebakti Poesponopo, *Asas-Asas dan Susunan Hukum*, (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 1994)
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Chamul Anwar, *Menidjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Segara, 1967)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009)
- Edison Piliang, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2013)
- Elizabeth E. Graves; penerjemah: Novi Andri, Leni Marlina, Nurasni, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*, cet Ke I, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2017)
- Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Hazairin, *Hendak Ke mana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976)
- Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1955)
- Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat (Bakal Penganta*, (Yogyakarta Leberty, 1985)
- Ibnu Ruys, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Cet ke-2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.)
- Irfan, *Fungsi Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, (Jurnal Edutech, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- IB, Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, (Surabaya, 1976)
- Kastulani, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013)
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Endinburg: Endinburg university press, 1991)
- Liwa Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah wa al-A'lam, Daar al- Masyriq*, (Beirut: tt),
- Lex J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posda karya, 2015)
- M. Yahya Harahab, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama (undang-undang no 7 th 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007)
- M. Qoraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan dan Kesorasian al-Qur'an*, Cet ke-4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, jilid II, (Ciputat: Lentera Hati, 2000)
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqasid al-Syaria'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/1998 M)
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Jakarta Bumi Aksara, 2003)
- Muhammad Syarif Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: PT. Alma'arif, 1961)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad 'Ali Shabuny, *Rawai' al- Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*,
(Beirut: Muassasah Manahil al-Irfani, 1400H/1980 M)

M. Tihami, Sohari Sobani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada)

Maria, S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2001)

M. Rasjid manggis Dt. Panghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*,
(Jakarta: Mutiara, 1982)

Muhammad 'Ali Shabuny, *Rawai' al- Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*,
(Beirut: Muassasah Manahil al-Irfani, 1400H/1980 M), cet. Ke-3

Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung: Pt Alumni,
2013)

Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung: Pt Alumni,
2013)

Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau,
(Padang: Indonesia, 1969), hlm. 59.

Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqasid al-Syaria'at al-Islamiyyat
Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/1998
M),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masroen, *Dasar Falasafat Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pasaman, tt.)
- Mer Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, *Pergeseran Peran Ninik Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi (Studi kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)*, (Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta)
- Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, Surabaya, 1976
- N.M. Rangkoto, Dt Bandaro, *Hubungan Mamak Dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang Serta Pasambahan Adat*, (Bukittinggi, 1984)
- Ninawati, *Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Ditinjau Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis*, (Jurnal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta Timur, 2017)
- Notiardi, *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, (Jurnal Fakultas syariah IAIN Bukittinggi, 2018).
- Puwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
- Romy Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Rianto Adi, *Metode Peneltian Sosial dan Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Granit, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokad dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Sa'ad Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1419H/1998 M)

Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, (Jakarta: 1994)

Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Ahabuni*, jilid 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985),

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991)

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Sa'ad Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1419H/1998 M)

Sayid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an, Juz III*, (Beirut : Dar Asy-Syuruq, 1412H/1992 M)

Sajati Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985,)

Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakart: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Suharsimi Arikunto, Suhardjono & Supardi, *Penelitian Tindakan kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Sri Sudaryatmi, Sukirno, T.H. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2000)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional dan balai pustaka, edisi ke III, 2003)
- Tihami, Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional dan balai pustaka, edisi ke III, 2003)
- Wahbah Zuhail, *Al- fiqh al –Islami Waadillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr al- Mu asir, t.t)
- Wawancara dengan Warmanizar di Sungai Dareh Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 30 Juli 2019
- Wawancara dengan Donri Dt. Sati di Kampuang Barangai Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 10 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Purwadi Dt. Rajo Imbang di Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 22 Juli 2019

Wawancara dengan Slamet Hidayat di Durian Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 1 Agustus 2019

Wawancara dengan Ahmad Latif Dt. Samiak di Durian Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 25 Juli 2019

Wawancara dengan Nyiak Yang basa di Durian Nagari Kamang Mudik pada tanggal, 21 Juli 2019

Internet:

<https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/> (di akses pada tanggal 13 Oktober 2019).

[http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03%20nurwani%20Hubungan%20Ninik%20Mamak%20\(Revisi-4\)%20edit%20mita.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03%20nurwani%20Hubungan%20Ninik%20Mamak%20(Revisi-4)%20edit%20mita.pdf) (diakses pada tanggal 06 Oktober 2019)

<http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.co.id/2012/03/syiqaq-pengertian-dan-akibat-hukumnya.html>. (diakses pada tanggal, 20 Agustus 2019)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23183
T E N T A N G



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1309/UN.04/PPs/PP.00.9/2019 Tanggal** , dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RISA HAYATI**
2. NIM / KTP : **21890220036**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Konsentrasi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S2**
6. Judul Penelitian : **KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK ANALISA TERHADAP KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA**
7. Lokasi Penelitian : **NAGARI KAMANG MUDIK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX.1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@ymail.com

Nomor : 1309/Un.04/PPs/PP.00.9/2019
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Pekanbaru, 23 Mei 2019

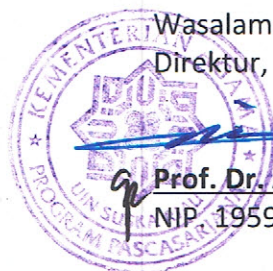
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Dengan hormat,
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk
mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Risa Hayati
NIM	: 21890220036
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: III (Tiga)
Judul Tesis	: Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Analisa Terhadap Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Nagari Kamang Mudik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK

Alamat Kantor: Kamang Hilir Phone. 0752 444268 Kode Pos. 26153

REKOMENDASI

Nomor: B.073/12/IP/KM/VI-2019

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN / OBSERVASI


Kami Camat Kamang Magek, setelah mempelajari surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : B.070/534-PERIZ/DPM&PTSP/VI-2019 tanggal, 10 Juni 2019, Tentang Rekomendasi Penelitian, Observasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian / Observasi tersebut, yang dilakukan oleh :

Nama : **RISA HAYATI**
Tempat / Tgl Lahir : **Pauh, 13-12-1993**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Jorong Pauh Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam**
NIK : **1306155312930001**
Judul TA : ***“ Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Analisa Terhadap Kewenangan Paman Sebagai Hakam***
Lokasi Penelitian : ***Dalam Hukum Keluarga ”***
Waktu : **Nagari Kamang Mudiak**
10 Juni s/d 10 November 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak Boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Kedatangan.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Pengambilan Data yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebiasaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan Laporan hasil penelitian sebanyak 1 (Satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati agam cq. Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Agam dan Camat/instansi yang bersangkutan.
5. Bila mana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka surat keterangan ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan izin Pengambilan Data ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Kamang Hilir, 17 Juni 2019
CAMAT KAMANG MAGEK

RIO EKA PUTRA, S.I.P, M.Si
NIP. 19870122 200701 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.070 / 534 - PERIZ/DPM&PTSP/VI-2019

Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala DPM PTSP Propinsi riau Pascasarjana/ HUKUM KELUARGA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAUNomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/23183 tanggal 24 MEI 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Risa Hayati
Tempat/Tanggal lahir : Pauh,13 Desember 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Pauh Kenagarian Kamang mudik kecamatan kamang magek kabupattem agam
Nomor Kartu Identitas : 1306155312930001
Judul : Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Analisa Terhadap Kewenangan Paman Sebagai hakim dalam hukum keluarga
Lokasi Penelitian : Nagari kamang mudik
Jadwal penelitian : 10 juni -10 November 2019
Penanggung Jawab : DPM PTSP Propinsi Riau

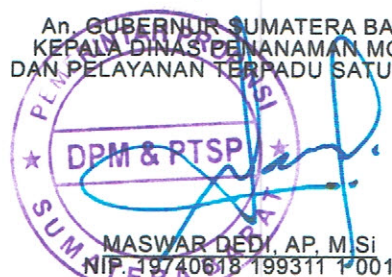
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 JUNI 2019

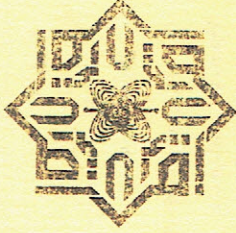
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Agam

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KARTU KONTROL KONSULTASI

REKAMINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

RISA HAYATI

NIM

21890220036

PROGRAM STUDI

Hukum Keluarga

KONSULTASI

Hukum Keluarga

PENASEHANTESIS/PROMOTOR

M. Junaldi Lubis & Amrul Muza'n

PEMIMPIN LUGO PROMOTOR

Dr. Amrul Muza'n

JUDUL TESIS/DISERTASI

Kedudukan waris dalam

masjerakat Abet Negeri Kawang

Madik. warisut perspektif Hukum

Islam Analisis terhadap kewarisan

paman keluarga takan

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	Senin 29/07-2019	gambaran dari judul yang harus dibuat untuk isi tesis harus paham mengenai Hakekat hukum	A	
2.	Senin 05/08-2019	Bab I diperbaiki	A	
3.	Senin 16/08-2019	Bab II diperbaiki ditambah landasan teori	A	
4.	Rabu 04/9-2019	Bab III diperbaiki	A	
5.	Senin 05/09-2019	Bab IV diperbaiki	A	
6.	Rabu 02/10-2019	ACC dan motto persetujuan	A	

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 02.10.2019

Pembimbing I / Promotor*

[Signature]

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	Senin 05/08-2019	perbaikan judul	A	
2.	Selasa 13/08-2019	perbaikan Bab I	<i>[Signature]</i>	
3.	Selasa 03/09-2019	menambah isi Bab II dan memperbaiki sistematika penulisan	<i>[Signature]</i>	
4.	Selasa 10/09-2019	perbaiki Bab IV	<i>[Signature]</i>	
5.	Rabu 03/09-2019	perbaiki Bab III	<i>[Signature]</i>	
6.	Rabu 02/10-2019	ACC	<i>[Signature]</i>	

Catatan:

*Coret yang tidak perlu




Pekanbaru, 02.10.2019

Pembimbing II / Co Promotor*

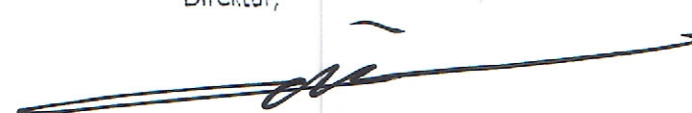
[Signature]

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risa Hayati
 NIM : 21890220036
 PROGRAM : magister
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	29/07-2019	Praktek Kapaah dalam keluarga		
2	Senin	melayu di Kecamatan Tasik Putri ^{bayuh}		
3		Kasb. Bengkalis		
4	29/07-2019	Perceraian di pengadilan Agama		
5	Senin	studi kasus Cerai gugat di PA		
6		Pekanbaru tahun 2017.		
7				
8	29/07-2019	Wali Adhal menurut Pasah		
9	Senin	23 dan khi		
10				
11				
12				
13				
14				
15				


Pekanbaru, 29-07 2019
 Direktur,


 Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RISA HAYATI
NIM : 21890220036
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	9/7-2019 Selasa	Penggunaan hak Cerai oleh Istri narapidana 3 tahun di lapaz kls 2 b pasir pengraian		
2		menurut hukum Islam.		
3	9/7-2019 Selasa	Hukum dalam masyarakat melalui analisa peran adat adat dalam pernikta		
4		han di desa muara mudi		
5	9/7-2019-Selasa	Hak membekali bekerja bagi pasangan		
6		rumah tangga dalam UU No 23 th 2014		
7		tas PKORT ditinjau menurut hukum Islam		
8	9/7-2019 Selasa	Nilai-nilai Al Quran tentang Perst		
9				
10		Kibaatan kepada pemimpin perspektif		
11		Hadist		
12				
13				
14				
15				

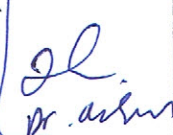
Pekanbaru, 09-07 2019
Direktur,


Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001


NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RISA HAYATI
 NIM : 21890220036
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	Jumat 20 - 03 - 2019	Tinjauan Mapasid Syariah Poligami pada UU No. 1 Tahun 1979 Pasal 5 ayat I		Aferadi
2	" - "	Perlindungan Anak atas PORNOGRAFI Dalam UU No. 44. Tahun 2008		SHOLIKUL JADID
3	" - "	Pandangan penghulu Dalam Nikah Mistikar		ARIFIN




Pekanbaru, 25 - 03 2019
 Direktur


 Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001


NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RISA HAYATI
 NIM : 21890220036
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1.	27 Maret 2019	Peran mawaf dalam memelihara harta warisan pusaka tinggi di kanaginan kamau mudik kec. kamang adaget kabupaten agam menurut hukum Islam		RISA HAYATI
2.	27 Maret 2019	Model wanita karier yang ditinggal mati oleh suami dalam perspektif hukum Islam dan masyarakat Al-Syarafah		EDI IRIYANSYAH ARUAN
	27 Maret 2019	Penetapan Nasab dari hubungan Biologis dalam perspektif fiqh Islam		OSCAR MAULANA

Pekanbaru, 27 03 2019
 Direktur


 Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RISA HAYATI
 NIM : 21890220036
 PROGRAM : Hukum Keluarga
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27 maret 2019	Harta gono gini dalam perceraian		
2		Dalam UU no 1 tahun 1974 tentang		
3		Keti		
4	27 maret 2019	Smartphone sebagai penyebab ketidak		
5		harmonisan keluarga di tt. Penget		
6		buat tahun 2018 (analisis terhadap		
7		Perceraian keluarga)		
8	27 maret 2019	Dispensasi nikah sebagai sebelum		
9		menapai usia menikah di pengadilan		
10		agarna Penget UU No 35 tahun 2014		
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 27-03 2019
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB:1.Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2.Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risa Harati
NIM : 21890220036
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Sabtu/26-05-2018	Mut'ah dalam Kompilasi Hukum		
2		Islam Perspektif Maqasid al-Syariah		Idin
3		Analisa putusan pengadilan Agama		Isti
4		dalam wilayah Hukum Pengadilan		Murni
5		Tinggi Agama Pekanbaru.		
6				
7	Sabtu/26-05-2018	Pembinaan Hukum Islam di		
8		Indonesia dan Implementasinya		Hardinal
9		Pada Peradilan Agama Islam		
10		(Kajian Pemikiran Bustamul		
11		Arifin).		
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 26 -05 2019
Direktur,

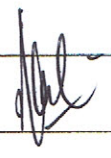
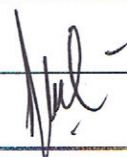


Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RISA HAYATI
 NIM : 2109 022 0036
 PROGRAM : Magister
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	10-05-2019 Jumat	Tinjauan mapasid syariah tentang		
2		Adanya Ahli Waris pengganti dalam		
3		KHI NO 1 Tahun 1991 pasal 185 ayat 1		
4				
5	10-05-2019 Jumat	'iddah wanita karena khulu'		
6		dalam pasal 155 kompilasi		
7		Hukum Islam Ditinjau menurut		
8		mapasid Al-syariah		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 10-05 2019
 Direktur,




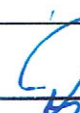


Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : RISA HAYATI
 NIM : 21890220036
 PROGRAM : Hukum Keluarga
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	23/April 2019	Kemampuan guru dalam mengimplementasi		Mutadi Widi
2		Pendekatan pembelajaran statistik kuantitatif 2013 pada mata kuliah pendidikan		
3		Agama SD se-ke. Mandau		
4	23/April/2019	Pengaruh metode pembelajaran Terhadap pembentukan Karakter siswa di sekolah		Dessy Sapitri
5		menengah pertama Islam Terhadap se. kec. Bangkinang Kota.		
6				
7	03/April/2019	Peningkatan Profesionalisme Guru Madrasah oleh penguas madrasah		Armadis
8		di kabupaten Kuantan Singingi		
9				
10	03/April/2019	Implementasi Teori Konvensionalisme dalam		Abdul
11		Pembelajaran PAI di SMP se-kecamatan		Mutadi Widi
12		Bangkinang Kabupaten Kampar.		
13				
14				
15				

Pekanbaru, 23-04 2019
 Direktur,


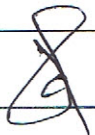
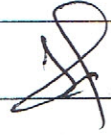


Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001


- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risa Hayati
NIM : 21090220036
PROGRAM : Pascasarjana
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	26-09-2019	Adab dalam Peringatan		Rahmad
2	Rabu	Analisis ayat-ayat Sirr dan 1 Al-Munafik dalam Infaq		Atgar.
3	26-09-2019	Musyawarah dalam politik		
4	Rabu	Isi dan Analisis terhadap Ayat		ahmad
5		dalam Al-Quran Surat al-nah		Fadhil
6		ayat 29 - 40		
7	11-11-	Bakhi dalam al-Quran		
8		Studi terhadap penafsiran al-Quran		Abdul
9		Surat dalam kitab madani al-		malik
10		Tanzil wa Hadaiq Al-Tawil		
11				
12				
13				
14				
15				

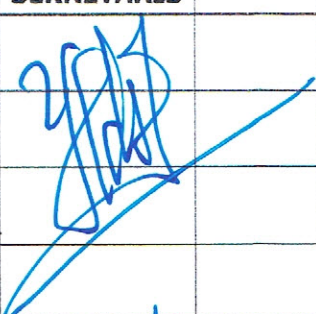
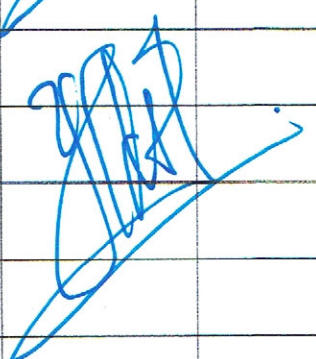
Pekanbaru, 26-09 2019
Direktur,


Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risa harati
NIM : 2090220036
PROGRAM : Hukum Keluarga S2
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	26-09-2019	Maqasid al-Syariah Syarat		
2		Polygami Undang-Undang NO 1		
3		tahun 1974 dan al-Fiqh Perkawinan		
4				
5	26-09-2019	Pandangan Hukum Islam Terhadap		
6		Pendapat IBN al-Qayim al-Jumali		
7		terhadap Penetapan Nasab		
8		anak diluar pengadilan		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....



Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST
DIBERIKAN KEPADA

Risa Hayati

Nomor ID : 21890220036
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 13 Desember 1993

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 55
القرأة : 54
القواعد : 50
النتيجة : 530

Berlaku Hingga : 09 Maret 2021



*Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info*



Mahyudin Syukri, M.Ag
The Head of Language Development Center



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكوميه الاسلاميه



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Risa Hayati
ID Number : 21890220036
Date of Birth : December 13, 1993
Sex : Female
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 54
Structure & Written Expressions : 55
Reading Comprehension : 44
Overall Score : 507

Expire Date : February 19, 2021



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I.

1. Nama : Risa hayati S.Sy
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pauh, 13 Desember 1993
3. No. HP : 085363613124
4. EMAIL : risahayati1234@gmail.com
5. Nama Orang Tua : Warmanizar (Ayah)
Asmawati (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 35 Kampuang Pauh, Kab. Agam Bukittinggi : 2000 - 2006
2. MTS YATI Kamang Mudik Kab. Agam Bukittinggi : 2006 - 2009
3. MAN Model Bukittinggi : 2009 – 2012
4. UIN SUSKA RIAU : 2012 – 2016

II. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Relawan di Sahabat Muda Community
2. Magang di Sinergi Cunsulting November 2019
3. Pegawai kontrak di dinas Perumahan dan Permukiman (PU), Kotaku Pekanbaru
15 Juli 2017- 28 Februari 2019
4. Tenaga pendidik, pengajar privat 2016- sekarang
5. Relawan di GPS Rahmatanlil'alam 2019 - sekarang

III. PENGALAMAN KERJA DAN ORGANISASI

1. Anggota BEM bidang intelektual tahun 2013
2. Bendahara Umum di jurusan Ahwalul Syakhsyah 2014-2016
- Anggota ROHIS 2014-2015